KELOMPOK STUDI RADMILA

PMJ'S NOMADS

MANUAL BOOK

BIAR KAGA "CULTURE SHOCK" CEUNAH

PANTERA MANTELLI MARDAHEKA

OTORITAS PENERBITAN LINTAS LEMBAGA
RAFLY MUZHAFFAR RIZQULLAH

FEDERASI PERANTAU JABODETABEK - DAN SEKITARNYA, PULAU LOMBOK; PMJ UNIVERSITAS MATARAM

PERKUMPULAN MAHASISWA JABODETABEK - DAN SEKITARNYA

SEKRETARIAT PMJ, JALAN GILI AIR NO. 100, KELURAHAN TAMAN SARI, KECAMATAN AMPENAN, KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

INSTAGRAM: @PMJUNRAM

PENGANTAR PENULIS

Sini dulu lah, jangan buru-buru.

Buku ini dibuat oleh salah satu mahasiswa yang rentan akan penyakit asam lambung yang cenderung mengklaim dirinya sebagai bajingan; mengapa demikian? Saya selaku penulis sangat menyukai kehidupan yang *nomaden*, paling tidak menginap di rumah teman agar dapat membahas hal-hal yang menarik untuk dijadikan bahan obrolan yang kontinu secara komprehensif hingga salah satu dari kami (baca: saya dan teman saya) mengantuk. Saya cenderung menyukai aktivitas penelitian secara klandestin tanpa si subjek (dalam hal persetujuan) tahu bahwa ia yang saya maksud adalah bagian dari penelitian saya – maka, jika subjek tersebut dapat digeneralisir dengan tidak subjektif, tidak menutup kemungkinan bahwa saya pun juga menjadi akan menjadi bahan penelitian tersebut untuk diri saya sendiri. Terang, *manual book* ini dibuat berdasarkan *bargain* dari pengalaman dengan teori yang pernah saya telan. Bajingan bukan? Jelas terang, saya memang suka melompat dari satu ‘pohon’ ke ‘pohon’ lain.

Jika saudara/i sekalian berniat membaca *manual book* ini untuk kepentingan praktis yang membenturkan situasi dan keadan saudara/i pembaca sekalian, maka dapat dipastikan bahwa *“lo itu perantau”*. Anda tidak sendirian, kita dapat berkomunikasi secara implisit

melalui *manual book* ini. kita berdua sama-sama perantau, lebih-lebih menyandang status sebagai mahasiswa. Kelaparan ditengah malam dan tidak bisa membuka lemari pendingin untuk mencari mie instan layaknya di rumah adalah keresahan saya pada saat menginjakkan kaki di tanah rantauan, Pulau Lombok. Tujuan saya sangatlah sederhana, saya hanya ingin tidak menginginkan pengalaman pahit yang sama juga terjadi kepada orang-orang seperti saya, mahasiswa perantau. Hal tersebut bersandar pada etos dari kebudayaan egaliterian yang saya jadikan panduan hidup sebagai manusia yang mencari kemerdekaan sejati dibawah *habitus* kebudayaan neoliberal. Maka dari itu, terang, saya menyatakan diri saya tanpa rasa malu bahwa saya adalah bagian dari agen misi besar sosial-libertarian yang dalam ranahnya memupuk kebudayaan anarkisme dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, saya selaku penulis untuk dapat memberikan bentuk tali asih kepada saudara-saudara seperantauan saya pada berbagai asal, fakultas, tempat kediaman, hingga era dan zaman memiliki satu cara, yaitu menghimpun dan mengorganisir. Cara tersebut saya rasa sangatlah ampuh untuk dapat bertahan hidup di tanah yang sebelumnya asing; penciptaan komunitas yang berstatus primordial semata-mata agar dapat memberikan ruang kontrol satu sama lain agar tidak merasa merugi pada satu kesempatan tertentu. Realita langsung yang terjadi biasanya merujuk kepada *culture shock* yang ditinjau dari sektor pendidikan dan kebudayaan. Bentrokan *habitus*

dapat terjadi ketika manusia tidak memiliki subjek yang sama statusnya dengan dirinya hingga akhirnya sulit menyesuaikan kebudayaan dan kebiasaan di tanah rantauan. Paling kacau, imbasnya biasanya dapat berupa kontradiksi kebiasaan secara internal; tidak tahan akan kebiasaan baru; lebih-lebih memicu pertengkaran antar subjek – konyol.

Maka dari itu, upaya untuk saling memberikan klarifikasi, saran, dan tinjauan satu sama lain sebagai mahasiswa perantau sangatlah penting agar tetap dapat hidup di tanah rantauan, lebih-lebih memiliki motivasi untuk menyelesaikan studinya.

Saya dengan berusaha mencari kata-kata yang cukup sopan dan tidak arogan, pernah mengambil bagian upaya penghimpunan dan pengorganisiran sesama mahasiswa perantau yang berasal dari Jabodetabek di Pulau Lombok. Melalui KMPJ (Kumpulan Mahasiswa Perantau Jawa) yang pernah saya dan saudara/i seperantauan saya rintis, kami telah menyumbangkan berbagai macam ekspresi dan ide untuk eksistensi organisasi agar dapat mempermudah upaya penghimpunan dan pengorganisiran. Kami dengan terus terang merintis dan memulai semuanya secara anarkis (baca: tidak sistemik), pekerjaan penghimpunan dan pengorganisiran dilakukan atas kesadaran yang tumbuh secara organik dan tidak memiliki tendensi politik praktis dan etis didalamnya. Kami murni menyukai situasi dimana banyak saudara senasib saling bertukar cerita dan dengan secara konyol membandingkan kebudayaan

wilayah asal kami dengan kebudayaan wilayah rantauan kami; tidak sama sekali berniat untuk mengolok kebudayaan rantauan, ini adalah cara kami agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Antitesis-antitesis kebudayaan dan kebiasaan telah memperlihatkan dan memberikan kami sinyal untuk dapat menghargai satu sama lain secara umum, tidak memandang ras, asal wilayah, usia, dan berbagai macam latar belakang subjektif lainnya. Menurut kami keberadaan KMPJ pada saat itu semata-mata untuk saling mengevaluasi diri satu sama lain agar tidak salah dalam menilai dan melihat kebudayaan dan kebiasaan baru di tanah rantauan.

Seiring perkembangan zaman, KMPJ berubah nama menjadi PMJ (Perkumpulan Mahasiswa Jabodetabek dan sekitarnya). Singkat, Jika KMPJ yang memiliki status nama “Jawa” menimbulkan pertanyaan bagi saudara/i sekalian, baiknya mungkin perlu juga saya jawab; bahwasannya pengerucutan sektor konsolidasi komunitas primordial diluar wilayah demarkasi tanah rantauan diperlukan karena banyak dari tenaga konsolidator KMPJ pada saat itu berstatus domisili Jabodetabek, lebih-lebih mereka menilai bahwa perbedaan corak kebudayaan antara kebudayaan Pulau Jawa secara umum dengan kebudayaan wilayah metropolitan (baca: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sangatlah berbeda ditinjau dari pijakan kebudayaan secara antroposentris dan demarkatif. Kebudayaan Pulau Jawa secara umum cukuplah kompleks dengan berbagai macam variasi kebudayaan dan

kebiasaannya, sedangkan kebudayaan dan kebiasaan wilayah metropolitan cenderung hampir sama satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kesepakatan para konsolidator pada saat itu cukup mengerucutkan wilayah metropolitan Jabodetabek sebagai fokus dan target konsolidasi mahasiswa perantau Pulau Lombok.

Kembali pada pembahasan, ide-ide dari kalangan organisator kemahasiswaan hingga mahasiswa *kupu-kupu* (baca: kuliah – pulang, kuliah – pulang) terwadahi untuk dapat memperluas jaringan dari berbagai macam instrumen yang ada di tanah rantauan, hingga bahkan gejolak politik internal yang dialektis. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang kami terima dari dan untuk satu sama lain agar dapat membawa markah mahasiswa perantau Jabodetabek lebih besar. Lagi-lagi saya tekankan, tidak bermaksud arogan, memperluas jaringan dan memperbesar eksistensi PMJ adalah cara kami agar dapat memiliki banyak kawan dari organisasi lain yang tidak primordialis sekalipun. Dalam hal pendidikan dan kebudayaan, kami berupaya untuk tetap dapat mencetak banyak tandem baru dari berbagai macam sektor dan aspek agar dapat saling mencerdaskan satu sama lain, mengingat klik kebudayaan terdekat mahasiswa merupakan aktivitas akademik baik didalam dan diluar kampus.

Manual book ini saya buat dengan menggabungkan antara teori dan praktik yang pernah saya dan saudara-saudara seperantauan saya (tanpa melihat nama aras organisasi: KMPJ, PMJ, hingga FPH-Kosturad)

agar dapat menjadi tinjauan komunikatif. Maka, apa yang akan saya tuangkan belum-lah konkret dan selalu benar. Saya percaya akan status manusia yang dialektis; berubah dan berkembang merupakan hal yang lumrah terjadi bagi subjek individu maupun organisasi. Saya percaya bahwa besarnya organisasi akan selalu berpijak pada kadar solidaritas yang selalu dijaga dari tiap-tiap era dan zaman; hal ini kemudian ditinjau dari bagaimana kemudian kita harus saling sama-sama mengerti, memberikan masukan dan evaluasi, hingga berani menjadi pemimpin paling tidak untuk diri sendiri.

Wahai para mahasiswa perantau pembaca ***“PMJ’S Nomads Manual Book”***, eksistensi PMJ akan selalu bergantung pada anda.

Mataram, 7 September 2022,

Pantera Mantelli Mardaheka

DAFTAR ISI

GLOSARIUM

Altruisme, merupakan bentuk kesukarelaan dalam upaya menolong dan membantu, akan tetapi praktiknya bahkan melampaui hubungan mutualis. Seorang Altruis akan menolong dan membantu segala kesulitan yang dialami oleh subjek lain secara abstrak; karena basis hubungannya merupakan basis hubungan moralis – bahkan seorang altruis rela hingga haknya mutlaknya tereduksi untuk menolong dan membantu subjek lain.

Analogi, merupakan suatu bentuk permisalan dan pengandaian dari suatu keadaan tertentu dengan menggunakan contoh lain agar dapat masuk kedalam pengertian yang lebih mengerucut pada suatu pengertian yang sulit dimengerti oleh orang lain.

Anarkisme, merupakan ajaran atau pandangan hidup bahwa suatu komunitas harus mengamini perdamaian. Dengan menggunakan metode *no gods*, *nomasters*, *no captains*; atau tidak sama sekali mengizinkan hegemoni kekuasaan didalam pedomannya. Karena kekuasaan akan selalu bertendensi pada kepentingan subjektif dan memungkinkan penguasa untuk cenderung tidak melihat persoalan bersama. Hal tersebut semata-mata digunakan untuk tidak menciptakan ruang pengkelasan dan stratifikasi sosial yang membatasi kemerdekaan personal.

Peter Kropotkin kemudian memaparkan bahwa anarkisme merupakan istilah yang diberikan pada prinsip atau teori kehidupan dan pe- rilaku di mana masyarakat dipahami

hidup tanpa pemerintahan —harmoni dalam masyarakat seperti itu diperoleh, bukan dengan tunduk pada hukum, atau dengan kepatuhan pada otoritas apa pun, tetapi dengan perjanjian bebas yang disepakati oleh berbagai kelompok, teritorial dan profesional, dibentuk secara bebas demi produksi dan konsumsi, juga untuk kepuasan beragam kebutu- han dan aspirasi makhluk beradab.

Anarkistis, merupakan tindakan yang diamini oleh ajaran anarkisme dengan metode perusakan dan penghancuran segala entitas yang bertendensi pada kekuasaan etis (tindakan balas budi antar penguasa).

Antroposentris, merupakan hubungan perilaku antara manusia dengan ekologi. Hal ini berkaitan erat dengan ajaran anarkisme mengenai hubungan perdamaian manusia dengan alam.

Aras nama, merupakan entitas yang mewakili simbol penamaan organisasi. Aras nama cenderung bersifat vertikal namun tergantung dengan watak organisasi (apakah organisasi terkait merupakan organ yang egaliter atau reaksioner). Misal: PMJ Federal Mataram; PMJ Cabang Universitas Mataram; PMJ Komite Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

Bargain, merupakan upaya untuk menghimpun suatu entitas yang tercecer dan berantakan agar dapat menemukan kesimpulan umum dari tiap-tiap persoalan khusus.

Basis Sosial, merupakan basis dimana terdapat masyarakat yang melakukan aktivitas dari segala sektor dan dapat didefinisikan melalui berbagai macam pendekatan.

***Bottom-Up*,** merupakan sistem kepemimpinan yang bertendensi pada kepentingan umum. *Bottom-Up* berangkat dari aras vertikal paling bawah menuju keatas. Lawan dari *Bottom-Up system* adalah *Top-Down system* yang berlaku sebaliknya.

***Communal Web*,** merupakan konsep keterhubungan antar manusia dalam suatu komunitas yang menyepakati konsep mutual aid. *Communal Web* mengamini sistem tanpa tendensi politik pemimpin reaksioner; karena *Communal Web* berbicara mengenai upaya hubungan kerja yang egaliter.

Demarkatif, merupakan sifat dari status wilayah yang terbatas dan memiliki ukuran.

Dialektika, merupakan metode untuk mencari persoalan umum melalui perosalan-persoalan khusus. Berbeda dengan *bargain*, Dialektika menggunakan metode yang berkembang dan berubah untuk menilai suatu persoalan dengan cara memetakkan Tesis (fenomena awal), Antitesis (Fenomena lain yang memengaruhi eksistensi dan keberlakuan tesis), dan Sintesa (Kesimpulan dari distorsi antara Tesis dan Antitesis).

Diskredit, merupakan lawan dari kredit atau ketetapan atau eksistensi. Diskredit merupakan penilaian yang abstrak mengenai suatu entitas.

Distorsi, merupakan gejolak yang saling berlawanan satu sama lain. Distorsi mengamini kehancuran antar gejolak dan pengurangan nilai dari tiap-tiap entitas yang saling berlawanan tersebut.

Dogmatisme, merupakan hasil dari ajaran positivisme. Dogmatis merupakan upaya untuk menilai suatu gejolak atau bahkan entitas dengan berpaku pada ilmu pengetahuan yang memiliki *power* untuk memengaruhi subjek dalam pengaruhnya.

Doktrin, merupakan pengertian yang dikemukakan oleh seseorang dan dijadikan sebagai pertimbangan untuk menilai suatu entitas.

Domestik, merupakan kebutuhan pokok yang dimiliki oleh manusia dalam hal untuk memenuhi kebutuhan Sosio-Politiknya.

Egaliter, merupakan sistem kepemimpinan kolektif yang memiliki praktik kesetaraan dan keadilan total. Hubungan antar subjek egaliter adalah hubungan horizontal tanpa memungkinkan subjek lain memiliki *power* yang lebih dari subjek lainnya.

Ekonomi-Politik, merupakan hubungan manusia dalam hal pemenuhan haknya. Skema Ekonomi dan Politik tidak dapat dipisahkan, kedua entitas tersebut saling memengaruhi dan dipengaruhi. Misal: hubungan timbal

balik yang etis antar subjek melalui basis ekonomi kemudian memengaruhi hubungan politiknya satu sama lain.

Emosional, merupakan hubungan moral antar subjek yang lebih dari sekadar hubungan perkawanan. Hubungan emosional bertendensi kuat dengan mutual aid fase mekanik.

Etos, merupakan pedoman yang berlaku pada tiap-tiap hak personal maupun pekerjaan organisasi. Etos berlaku secara prinsipil.

Fenomenologi, fenomenologi adalah ilmu yang mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam pendekatan, terkhusus melalui pendekatan Ekonomi-Politik sebagai pendekatan yang memungkinkan keterhubungan antar subjek yang saling memenuhi kepentingan personalnya satu sama lain.

Formil, merupakan skema yang tercipta untuk menciptakan simbol dari suatu situasi.

Habitus, merupakan suatu kebiasaan yang dilegitimasi baik secara personal maupun dalam tubuh komunitas sekalipun. Habitus biasanya dicerminkan dari kebudayaan struktural.

Hasrat Borjuasi, merupakan hasrat yang dimilik oleh subjek yang tergolong dalam kelas borjuasi. Terdapat dua pokok kandungan hasrat borjuasi yaitu: (1) Hasrat ingin memiliki segalanya; dan (2) Hasrat ingin dikenal secara luas.

Hegemoni, merupakan hubungan relasi kuasa yang bahkan memengaruhi suatu gejolak bahkan keputusan yang etis. Hegemoni mengindahkan kepentingan subjektif karena *power person* yang ia miliki.

Heterogen, merupakan keadaan atau situasi yang memiliki keberagaman dari tiap-tiap entitas maupun sektor, namun sifatnya masih tercecer. Penilaian heterogen didasari pada kondisi basis sosial.

Hiperbolis, merupakan konsep atau gaya penyampaian simbolik dengan melebih-lebihkan hakikat dasar tanpa menghilangkan pengertian mutlak didalamnya.

Ideologi, merupakan ajaran atau pedoman hidup yang diformilkan menjadi suatu sistem penyelenggaraan. Ideologi cenderung menciptakan gejolak dogmatisme dan positivisme.

Imperialis, merupakan subjek penguasa tunggal yang menggunakan relasi kuasa skala besar untuk tetap dapat mempertahankan kekuasaannya. Imperialis cenderung menggunakan pendektana Ekonomi-Politik sebagai pion utama karena keterhubungan dan kebergantungan entitas kecil dengan entitas besar akan selalu menguntungkan konseptor (baca: entitas besar) namun akan merugikan kemungkinan peruntungan para subjek yang terpengaruh (baca: entitas kecil).

Implementasi, merupakan tindakan untuk memenuhi keinginan suatu subjek secara taktis.

Isegoria, merupakan komunikasi politik yang bebas, tetapi dilakukan secara bijak dan berkualitas sehingga tercipta kebaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isegoria sebagai upaya perdamaian yang mengutamakan dialog untuk mencapai suatu pemecahan masalah.

Kasuistik, merupakan salah satu pendekatan yang menilai segala macam persoalan didasari pada kasus dan isu yang telah terjadi secara objektif.

Kebudayaan, merupakan bentuk formil dari kebiasaan yang diambil sebagai pembenaran kebiasaan kultural.

Klandestin, merupakan tindakan yang tidak terlihat sama sekali. Kaitannya erat dengan cara-cara yang melawan arus untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Tindakan klandestin digunakan semata-mata karena alasan keamanan milik pelaku klandestin (baca: kalndestor)

Kolektif, merupakan hubungan antar subjek yang lebih dari sekadar hubungan emosional,. Kolektif merupakan simbol dari hubungan politik berbasis relasi moral antar subjek.

Komandoisme, merupakan skema yang bertendensi erat dengan power. Komandoisme mengizinkan kebenaran subjektif dalam pemaknaannya. Praksis dari komandoisme sendiri ialah suatu upaya untuk tetap dapat tunduk pada seorang konseptor; hingga yang tunduk tidak memiliki kemerdekaannya sendiri.

Komprehensif, merupakan agenda masif yang sifatnya berkelanjutan secara kontinu. Komprehensif berkaitan erat dengan proyeksi dan menghitung ukuran suatu program apada jangka panjang.

Kompromis, merupakan skema etis (dalam hal ini adalah hubungan timbal balik) dengan saling memperdebatkan hal apa yang seharusnya dimiliki, digunakan, ataupun diciptakan bersama subjek-subjek lain.

Kontra-Argumentasi, merupakan gejolak distorsi dari argumen yang dijadikan sebuah tesis. Kontra-Argumentasi berlaku sebagai antitesis dalam analisis wacana karena memiliki bobot daya kritik terhadap tesis pertama.

Konvensional, merupakan skema yang bertendensi pada penyederhanaan entitas yang konkret. Konvensional diidentifikasikan sebagai pola hubungan tahap pra-pengembangan.

Kosmopolitan, merupakan cita-cita besar mengenai upaya perwujudan negara tanpa pertentangan kelas, hingga dunia tanpa negara.

Kultus, merupakan hasil dari kebudayaan dan kebiasaan yang diberikan status formil sehingga bernilai sakral dan diterapkan pada norma-norma identitas tertentu.

Logistik, merupakan kebutuhan pokok yang dimiliki oleh manusia dalam hal untuk memenuhi kebutuhan Ekonomi-Politiknya.

Majemuk, merupakan keadaan atau situasi yang memiliki keberagaman dari tiap-tiap entitas maupun sektor dalam satu kesatuan himpunan yang menggolongi tiap-tiap entitas terkait. Berbeda dengan heterogen; penilaian majemuk didasari pada karakter dan sifat baik secara personal maupun dalam skala komunitas.

Manifesto, merupakan alasan terbentuknya suatu gejolak, ajaran, pandangan, dan segala entitas yang memiliki simbol pemaknaan. Menifesto erat kaitannya dengan latar belakang untuk menemukan alasan dari dibalik keberlakuan suatu Gejolak, ajaran, serta pandangan.

Marjinal, merupakan gejolak dari hasil distorsi yang seakan tidak dapat menganggap eksistensi suatu entitas ada. Marjinalisasi erat kaitannya dengan penilaian subjektif terhadap suatu entitas.

Materialisme Dialektika Historis, merupakan metode untuk mencari pembenaran dari suatu fenomena agar dapat menemukan sintesa yang objektif. Materialisme Dialektik Historis atau yang kemudian biasa disingkat menjadi MDH, menggunakan cara menelusuri awal mula penciptaan suatu entitas agar dapat menemukan jawaban dalam ranah tesis dan sintesa. MDH erat kaitannya dengan pertanyaan radikal mengenai suatu gejolak yang sedang dialami oleh peneliti.

Merariq, merupakan kebudayaan lokal Pulau Lombok yang berkaitan dengan upaya untuk mencari jodoh dengan cara si laki-laki menculik perempuan di malam hari, ataupun dengan pembenaran waktu kembali ke rumah

yang dimiliki oleh si perempuan tidak tepat waktu – biasanya diukur pada jam 10:00 WITA.

Metodologi, merupakan ilmu mengenai upaya untuk mencari metode dalam menanggapi suatu gejolak; sebelum metode terkait digunakan secara teknis.

Moralisme, merupakan pandangan hidup untuk mencari kebahagiaan dengan cara memiliki hubungan meta-perkawanan dengan subjek-subjek terntentu

Neoliberal, merupakan era dimana pasar dan keuangan global dikuasai oleh Imperialis hingga memengaruhi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat entitas kecil dari berbagai macam negara setengah jajahan.

Nomaden, merupakan metode yang digunakan oleh masyarakat pada era komunal-primitif dengan cara berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nomaden identik dengan dialektika alam; ketika suatu suku komunal primitif ataupun individu primtif sudah tidak dapat mengeksploitasi hasil alam dari suatu lokasi, maka ia akan mencari lokasi lain agar dapat dieksploitasi hasil alamnya.

Objektif, merupakan penilaian yang diambil dari keadaan yang riil dan nyata atas suatu gejolak.

Ontologi, merupakan metode yang digunakan pada ranah kajian filsafat untuk menemukan hakikat suatu entitas.

Oportunisme, merupakan salah satau kesalahan dalam cara berpikir subjek egaliter. Oportunisme erat kaitannya

dengan kesombongan, kecongkakan, arogansi, dan melebih-lebihkan kenyataan objektif.

Paguyuban, merupakan salah satu bentuk komunitas yang bercorak pada kesamaan etnis antar subjek komunitasnya**.**

Paradigma, merupakan suatu pandangan yang memengaruhi subjek terhadap situasi dan kondisi lingkungannya. Paradigma dapat memengaruhi subjek melalui upaya untuk berpikir, bertindak, dan menilai.

Patriarki, merupakan skema untuk memberikan ruang superior terhadap kaum laki-laki yang memiliki status kelas yang seakan lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Dalam hal ini, patriarki menuntuk hak keadilan borjuasinya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban milik laki-laki yang cenderung mereduksi peran perempuan sebagai salah satu subjek konstruksi sosial.

Politik, merupakan upaya milik manusia agar tetap dapat bertahan hidup dengan cara menjalankan aktivitas-aktivitas humanisme dari berbagai macam kemungkinan.

Positivistik, merupakan pandangan yang berpijak pada suatu doktrin atau ilmu pengetahuan tertentu tanpa mempertimbangakan gejolak sosial yang terjadi serta solusi praktis.

Post-Truth**,** merupakan era kebudayaan yang selaras dengan era neoliberalisme. Karakter era post-truth memiliki banyak kontradiksi dalam segala macam

pemaknaan untuk menemukan sintesa yang objektif. Hampir dapat dikatan bahwa era post-truth merupakan era yang melahap segala ajaran filsafat terdahulu sebagai metode untuk mencari penilaian. Karena terdapat, banyak kontradiksi pengetahuan yang saling berbenturan, post-truth sendiri pada akhirnya selalu memperlihatkan sisi samarnya. Untuk itu, post-truth cenderung dinilai sebagai era pengetahuan dimana kebohongan dapat menyamar seakan menjadi kebenaran.

Pragmatisme, merupakan tindakan yang tidak komprehensif dan cnderung sederhana dalam metodologisnya (biasa diucapkan dengan narasi *simple*). Pragmatisme berusaha untuk mencari solusi praktis, namun karena habitusnya, pragmatisme akhirnya kabur akan pandagan-pandangan lain.

Praktik, merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan secara strategis. Perwujudan konkret dari praktik ialah implementasi teknis.

Primordial, merupakan status skema yang menitikberatkan penilaian kemiripan hingga kesamaan etnis kebudayaan antar subjek.

Quo Formil, merupakan keadaan tetap yang dikultuskan menjadi konsep formal.

Sektarianisme, merupakan watak yang cenderung menelan positivisme dan dogmatisme bahkan dengan implementasi komandoisme. Sektarianisme bermain

dengan simbol dan pemaknaan secara total – cenderung terlihat oportunis.

Simbolik, merupakan perwujudan dari suatu penanda (lambang bunyi) yang lahir dari petanda (makna dari apa yang telah diwujudkan oleh penanda)

Sosial-Libertarian, merupakan ajaran atau paradigma yang berbicara mengenai gejolak sosial untuk meraih kemerdekaan sejati secara personal. Sosial-Libertarian erta kaitannya dengan ajaran egaliterianisme dan anarkisme.

Sosio-Kultur, merupakan gejolak yang terjadi pada basis sosial dengan mencari upaya pembenaran melalui bentekana primordial yang erta kaitannya dengan kultur, etnis, dan kebiasaan masyarakat lokal.

Sosio-Politik, merupakan hubungan manusia dalam hal pemenuhan haknya dalam ranah kebudayaan. Tidak seperti Ekonomi-Politik, skema Sosial dan Politik dalam hal ini ditafsirkan sebagai berwujudan hubungan sosial secara abstrak serta jauh dari hubungan politik etis.

Soviet, merupakan sistem kedewanan milik masyarakat sosialis yang pernah diterapkan di negara *Uni Soviet Socialist Republic* (USSR). Sifat dari Sistem Soviet berbeda dengan Sistem Parlementariat. Sistem Soviet cenderung memiliki hubungan kepemimpinan kolektif secara *Bottom-Up*, sedangkan Sistem Parlemetariat menelan sistem kesepakatan secara *Top-Down*.

Strategis, merupakan perwujudan metode untuk meraih keinginan, tujuan, bahkan cita-cita yang mencakup skala besar dan luas.

Struktural, merupakan status eksistensi yang menilai hak masyarakat melalui hubungan horizontal antar subjek. Persoalan struktural dapat menciptakan Konstruksi Sosial yang abstrak akan sistem hierarkis ala hubungan vertikal. Maka dari itu, persoalan struktural haruslah bersih dari sistem pertentangan hubungan vertikal melalui sistem pengkelasan. Persoalan struktural lebih menekankan eksistensi kodrati dari tiap-tiap subjek. Misal: Kodrat perempuan hanyalah mengandung dan melahirkan anak, bukan memasak, mencuci pakaian, dan sekadar melayani hasrat seksual laki-laki. Penghilangan nilai dari hakikat kodrati terhadap perempuan seperti inilah yang kemudian membuat para perempuan melalui penilaian hubungan vertikal sebagai *manusia kelas dua.*

Subjektifisme, merupakan peniliaian yang jauh dari upaya untuk melakukan identifikasi dan investigasi secara komprehensif terhadap suatu gejolak, fenomena, seubjek, dan entitas-entitas lainnya. Subjektif erat kaitannya dengan pragmatisme.

Swa-Kelola, merupakan upaya mandiri dalam berbagai sektor yang dilakukan oleh masyarakat egaliter dan tidak memiliki campur tangan entitas kekuasaan dalam hal pelaksanaannya.

Tabulasi, merupakan skema dialektika dari *bargain.* Tabulasi merupakan upaya untuk menghimpun *bargain*-

bargain yang telah terhimpun agar dapat menemukan sintesa umum dari tiap-tiap persoalan yang telah *dibargain* secara khusus.

Taktis, merupakan perwujudan metode untuk meraih keinginan, tujuan, bahkan cita-cita yang mencakup skala kecil untuk kemudian dibargain agar dapat memenuhi metode strategis.

Temporal, merupakan penilaian basis era, zaman, dan hal berkaitan dengan alam ruang dan waktu dalam dimensi ketiga.

Terminologi, merupakan pengertian yang menjelaskan lebih lanjut mengenai suatu istilah

Utopia, merupakan cita-cita khayalan dan tidak ilmiah yang di idam-idamkan secara abstrak melalui pendekatan humanisme universal dan pandangan janra ekspresionisme

Zoon Politicon, merupakan salah satu asas yang mengatakan bahwa hubungan manusia akan selalu berketerkaitan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.
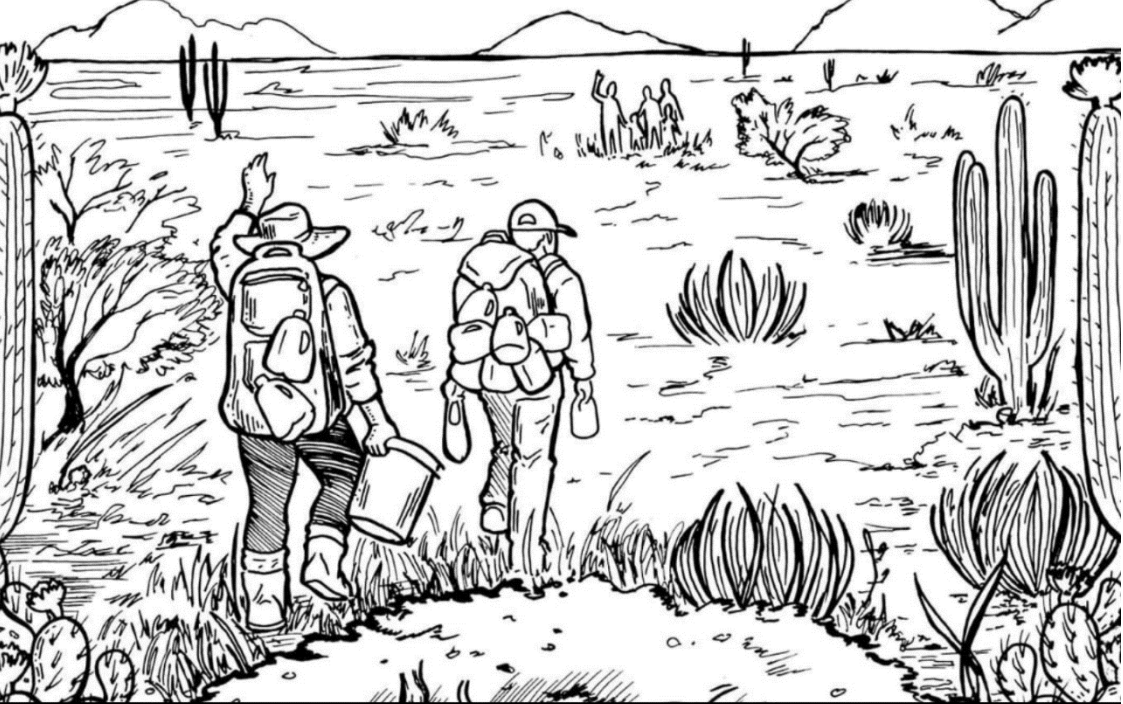
MAHASISWA PERANTAU?
MAHKLUK APA ITU?

MAHASISWA PERANTAU? MAKHLUK APA ITU?

Untuk mereka yang merasa hilang di tanah yang asing.

Mahasiswa Perantau

Mahasiswa merupakan salah satu golongan yang mempunyai karakter aktif, mempunyai mobilitas tinggi, dan cinta akan perubahan; dimana mahasiswa dapat dikatakan sebagai simbol dari kaum terpelajar yang sangat menginginkan cita-cita yang besar terhadap entitas yang mewadahinya maupun untuk dirinya sendiri baik dari skala kecil seperti organisasi maupun skala besar seperti negara. Untuk mewujudkan cita-cita yang dimiliki oleh mahasiswa perlu adanya pendidikan yang layak dalam hal ini pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu kognitifnya, disisi lain mereka menggunakan *softskill*-nya untuk meningkatkan kualitas kemampuan lain; karena etika belajar dalam perguruan tinggi berkiblat dalam pembangunan bangsa dan berorientasi pada kebutuhan pasar yang menginginkan tenaga kerja yang kompeten serta memiliki kemampuan multi talenta. Tidak heran mengapa kemudian banyak dari pemuda mencari perguruan tinggi negeri terbaik untuk meningkatkan kompetensi dirinya demi dapat meraih masa depan yang cerah; salah satunya adalah mahasiswa yang kemudian mengambil jalan rantau ke Universitas Mataram untuk mengemban ilmu.

Narasi “belajar dimanapun” merupakan manifesto yang kuat untuk seorang perantau. Mengingat Universitas Mataram bukanlah perguran tinggi negeri yang terkenal pada lingkaran akademisi se-nasional, tetapi Universitas Mataram merupakan institusi yang mewadahi mahasiswa dan seharusnya benar-benar menjalankan perannya sebagai lembaga akademis (dalam hal ini perguruan tinggi negeri) yang patut pula menjadi lokomotif perkembangan pendidikan untuk seluruh anak bangsa karena statusnya sebagai PTN.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya: Mahasiswa Perantau merupakan mahasiswa yang mendedikasikan dirinya untuk menimba ilmu pengetahuan tanpa berkompromis dengan kredit lokasi hingga memungkinkan dirinya agar tetap dapat bertahan terhadap situasi dirinya dikemudian hari. Ukurannya dapat dilihat dari kesiapan dirinya dalam hal ekonomi-politik personal. Namun, akan tetapi, benturan situasi secara kasuistik akan menciptakan nilai rantaunya sendiri. Ruang mimpi dan cita-cita utopia tidak akan sepenuhnya berjalan semulus seperti apa yang telah direncanakan oleh para calon mahasiswa perantau.

Problem Mahasiswa Perantau

Layaknya kehidupan domestik masyarakat pada umumnya, kini persoalan perantau adalah bagaimana mereka tetap dapat hidup di tanah yang sebelumnya tidak pernah mereka pijak. Ya... cukup hiperbolis, tetapi hal

tersebut perlahan menjadi kenyataan empiris bagi para perantau.

Awal mula para perantau berusaha untuk membiasakan dirinya terhadap kondisi basis sosial yang baru, seringkali mengalami *culture shock* karena belum terbiasa dengan situasi sosio kultur yang terdapat pada tanah rantaunya sendiri. Perdana untuk dirinya, perdana pula untuk orang lain yang akan menerima kehadirannya sebagai perantau didalam lingkarannya; hal ini yang kemudian membuat sebuah lembaga yang dapat mewadahi para perantau tersebut sangatlah diperlukan. Simulasi perannya sebagai penghubung si perantau dengan dunia barunya agar dapat mereduksi *culture shock*-nya; disisi lain pula dapat menjadi lembaga yang mewadahi kepentingan domestik para perantau yang termarjinalkan.

Perkumpulan Mahasiswa Jabodetabek - dan Sekitarnya Universitas Mataram atau yang kemudian disingkat sesingkat-singkatnya menjadi PMJ UNRAM (agar lebih mudah, mari sekadar menyebutnya sebagai PMJ saja) merupakan lembaga dengan status paguyuban yang siap mewadahi para perantau yang berdomisili dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya yang akan dan/atau sedang menjalani program pendidikan di Nusa Tenggara Barat khususnya pada Universitas Mataram.

PMJ UNRAM yang lahir pada 16 April 2021 secara utilitas mempunyai tugas pokok dan fungsi yang

telah terlampir secara formil di Konstitusi PMJ (diperbaharui pada tahun 2021). Konstitusi PMJ sendiri mengatur secara implisit dan berperan sebagai pedoman kehidupan bagi para perantau Jabodetabek. Corak komunitas mutual aid yang diinisiasikan oleh Peter Kropotkin-lah yang kemudian dijadikan sandaran kultur dalam berkehidupan; memang tidak diatur dan memiliki posisi status *quo formil* dalam bagian dari pedoman kehidupan perantau, melainkan hal ini merupakan komposisi dasar kultur masyarakat PMJ yang lahir secara tidak langsung di tubuh komunitas perantau ini.

Alih-alih dapat menjadi pedoman secara empiris, pada praktik implementasinya budaya mutual aid cenderung dinilai sebagai budaya yang anarkistis nan tanpa sistem sehingga menciptakan legitimasi kultur yang tidak terkonstruksi dan tersistematisasi dengan baik, hal tersebut seringkali dijadikan *counter attack* atas konsep mutual aid hanya karena Kropotkin merupakan salah satu pemikir Anarkisme. Dalam hal ini, secara tegas kita perlu memberikan abstraksi dari masing-masing terminologi dan memisahkan paradigma corak komunitas mutual aid dengan ideologi politik Anarkis itu sendiri. Menurut Peter Kropotkin, mutual aid merupakan seni berkomunitas dengan menciptakan skema gotong royong; dengan sederhana kita dapat mengartikan corak ini dapat memberikan kita untuk menabur benih saling mengerti antar kawan, terlebih sesama perantau. Saya sedikit mengutip candaan Kawan Entong (Faqih Siddiq, Liga Jakarta PMJ) "*susah boleh, laper jangan*". Memang

cukup anekdot, tetapi nilai narasi yang dapat kita telan dari seorang pemuda nomaden di tanah rantau ini adalah: "*selagi ada kawan, perutmu akan tetap terisi, kau akan tetap hidup selagi ada kawan yang mengerti soal konsep mutual aid ini".*

Tetapi, hal ini kemudian menjadi antitesis yang lebih lanjut menyoal realita keadaan objektif basis sosial PMJ dan legitimasi prinsip dari PMJ itu sendiri. Kadangkala, baik secara politis, emosional, dan bahkan kebudayaan, kita menyadari bahwasannya masih terdapat pertentangan antar kawan yang tercipta didalam tubuh komunitas ini. Lagi-lagi, baik dari hal sepele hingga hal yang cukup kasuistik. Pada akhirnya, kita dapat meraba sedikit demi sedikit bahwasannya perpecahan antar kawan ini dapat tercipta karena adanya *culture shock* yang sempat saya paparkan diawal tulisan ini; ketika kebudayaan lain bertemu dengan kebudayaan lain, ketika kebudayaan individualistik bertemu dengan kebudayaan kolektif. Beberapa praktik yang salah kadangkala kita izinkan untuk mendapatkan ruang dalam aktifitas mewadahi dan menghimpun saudara seperantauan; ketika ada kawan baru yang tidak lama baru bergabung dan dikenalkan dengan PMJ, maka si 'kawan baru' harus dapat menyesuaikan kebudayaan komunitas, dalam hal ini adalah PMJ itu sendiri; hal inilah yang menurut saya salah kaprah-prah-prah!

Pengorganisiran Itu Penting Bos!

Prinsip PMJ secara konstitutif sendiri mengatur soal anggota PMJ yang wajib menghimpun para kawan yang belum terhimpun, saya menyebutnya "*gagak-gagak yang hilang arah*"; terlebih dalam konsep mutual aid yang sempat saya singgung di pertengahan narasi. Kita sebagai anggota PMJ lebih-lebih yang mempunyai kesadaran perkawanan yang tinggi seharusnya tidak boleh mengizinkan budaya menutup diri, hal tersebut dapat berpotensi membuat si 'kawan baru' akan merasa termarjinalkan dan teralienasi, ya... gagal sudah kita menduduk kita yang terhimpun dalam komunitas ini untuk mendudukkan identitas sebagai lembaga yang diciptakan untuk mewadahi mahasiswa perantau Jabodetabek dan sekitarnya.

Mari bersimulasi seminimal mungkin, bagaimana dengan kawan kita yang tidak mempunyai rekan atau saudara sama sekali di tanah rantauan? Ya, mungkin mereka masih mempunyai organisasi atau himpunan tertentu yang akan mewadahinya, tetapi saya berpikir bahwa kebutuhan domestik terlebih logistik yang menyangkut dengan 9 sumber bahan pokok manusia merupakan komposisi yang tidak selalu dijamin oleh banyak orang; atau mengenai sulitnya mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya rasa, adanya PMJ yang menyandarkan corak kultur pada kebudayaan mutual aid dapat memberikan arti kehidupan untuk para kawan perantau. Ya, saya bicara mengenai sesama perantau.

Beberapa pengalaman saya temukan didalam agenda-agenda PMJ yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi, seperti Kawan Engkong (Algar, Liga Bekasi PMJ) dan Kawan Genta (Liga Bekasi PMJ) dalam agenda *Garden Party PMJ* di halaman belakang sekretariat kami yang memberikan manifestasi kerinduan dari mereka: "*buset, udah lama gue engga gaul ama bocah-bocah yang ngomonya 'gua' 'elu'*" hati saya sedikit merasa *bond up* setelah mendengar percakapan dua orang *baget* ini. Ada kerinduan yang tersimpan didalam hati mereka, bahkan mungkin kita semua untuk setidak-tidaknya mengetahui bahwasannya terdapat kawan yang juga pernah merasakan hitamnya pasir Pantai Ancol sebelum merasakan lembutnya pasir Pantai Senggigi.

Upaya untuk mempererat hubungan emosional dan kebudayaan bahkan pada aspek politik antar kawan memang dapat dibentuk dari bagaimana kita semua mempertahankan kebudayaan lahiriah kita di tempat yang jauh dari tempat asli lahirnya budaya tersebut. Tetapi, bukan berarti kita akan mengintervensi kebudayaan asli tanah rantau dari kebudayaan asli yang kita bawa; hal ini hanyalah sekadar upaya untuk mempererat hubungan satu sama lain. Sekarang, bayangkan jika kita tidak saling menghimpun?.

Kembali, upaya untuk mempererat dapat dilakukan dari hal paling mendasar: menerima kawan perantau yang baru memijakkan kakinya di tanah rantau-nya; tidak membuat skema alienasi dan marjinalisasi untuk kawan baru. Solusi terbaik yang dapat ditawarkan

adalah peningkatan disiplinasi untuk mengerti kondisi basis sosial kawan yang sebelumnya tidak terbiasa dengan kebudayaan PMJ yang cukup akulturasil ini. ‘Kawan baru’ perlu menyesuaikan dan hanya cukup mengikuti arus kebudayaan komunitas ini; sedangkan kawan lama harus bisa menerima dan menghimpun kawan yang baru bergabung. Demikianlah embrio mutual aid, ketika kita semua sudah bisa saling menerima, maka inisiatif untuk membantu dan mengerti keadaan antar kawan akan tercipta; karena kita akan kenal betul dengan situasi kawan tertentu, hingga akhirnya dapat mengenal lebih jauh mengenai komunitas ini. Maka demikian, persoalan subjektifitas antar kawan akan ter-reduksi atau setidak-tidaknya dapat dengan mudah terselesaikan. Silakan buktikan.

MARI BICARA LANGKAH STRATEGIS

MARI BICARA LANGKAH STRATEGIS

Terlalu banyak omong kosong! Perantau membutuhkan solusi praktis yang cepat secara metodologis.

"Bagaimana caranya, fam?!" Demikian pertanyaan yang selalu dilontarkan untuk para perantau yang baru saja mendapatkan wejangan yang sudah sempat saya tulis; aduh! Arogan sekali visualisasi yang saya berikan! Bicara mengenai cita-cita pengorganisiran tentunya tidak akan pernah tercapai jika tidak ada metode teknis yang mendukung – dalam hal ini merupakan *main course* untuk membentuk kerangka struktural yang kokoh nan-tidak ringkih. Upaya para perantau untuk menghimpun sesama mahasiswa perantau merupakan upaya moralis yang memiliki kandungan politis didalamnya; karena pada akhirnya kita akan menemukan pada tiap-tiap diskursus yang kita ciptakan, bahwasannya upaya untuk menghidupi satu sama lain merupakan bagian dari agenda politik manusia yang bersifat *zoon politicon*.

Manifesto

Lantas apa manifestonya? Bagaimana kemudian jika kapasitas kita sebagai agen pengorganisiran memiliki keterbatasan? Maka teknis pengorganisiran dibutuhkan agar dalam upayanya kita tidak begitu lelah dan memiliki

napas yang panjang agar tetap dapat hidup untuk menghidupi mahasiswa perantau yang nantinya akan kembali menghidupi kita. Entitas inilah yang saya maksud sebagai solusi praktis – upaya penghimpunan dan pengorganisiran akan terasa mudah jika kita sedikit memiliki komposisi teknis didalamnya. Hal ini pernah diterapkan oleh Murray Bookchin, seorang penganut anarkisme dari Amerika Serikat yang pernah mengarungi lautan perjuangan bersama Emma Goldman pada masanya.

Dalam simulasi *Post-Scarcity Anarchism* yang ia kemukakan, jaringan *communal web* merupakan hal yang dapat menunjang cita-cita kosmopolitan dunia, walau Bookchin selaras dengan prinsip-prinsip manusia bebas anarkisnya, ia tetap percaya bahwasannya upaya pembentukan komunitas sektoral sangatlah diperlukan sebagai metoda penghimpunan yang sistemik – lagi-lagi untuk mewujudkan situasi yang bebas dari sistem (keterbelengguan kemerdekaan; kontradiksi dari nilai ini memungkinkan relasi kuasa mutlak ala borjuasi yang mengamini krisis identitas politik).

Communal Web yang dikemukakan oleh Bookchin merupakan metode pengorganisiran yang sistemik untuk mencapai cita-cita asistemik – mengindahkan hubungan interkoneksi, bersifat sektoral, dan mutualis. Artinya, cita-cita kosmopolitan yang bebas akan sistem merupakan utopia bersama yang diinginkan oleh tiap-tiap insan manusia, akan tetapi, untuk mencapai titik tersebut, kita memerlukan metode yang dialektis; disisi dimana kita

pada akhirnya dibuat mengerti akan tujuan umum dari sistem *communal web*, kita juga diajarkan untuk memiliki disiplin dan etos kerja pengorganisiran. Ingat! Ini bukan tentang pemaksaan, melainkan merupakan langkah taktis untuk mencapai tujuan strategis.

Prinsip Egaliter

Untuk membentuk suatu kerangka metode pengorganisiran demikian, maka paling tidak kita memiliki dasar pijakan agar upaya penghimpunan dan pengorganisiran tidak bersifat positivistik dan membosankan karena hal-hal yang bersifat mutlak seolah kita tidak boleh keluar dari dinamisnya sifat manusia. Prinsip merupakan dasar pembentuk dari segala hal terkait; lebih-lebih prinsip dapat memberikan ruang disiplinasi tidak hanya dalam ruang komunitas, tetapi dalam diri yang akan menjadi konsumsi mutlak secara praktik dan implementatif. Dalam hal ini, titik tekan saya adalah bukan membuat sebuah alat pemaksa disiplinasi, melainkan membuat suatu pijakan lahiriah yang akan mengarahkan sifat dari organisasi terkait.

Untuk membentuk metode penghimpunan dan pengorganisiran yang egaliter, menurut saya paling tidak harus kita harus bersandar kepada enam prinsip berikut:

1. **Otonom,** artinya setiap unit mulai dari yang terkecil dalam organisasi dapat menjalankan kerja organisasi dan pengambilan keputusan secara mandiri,

lepas dari pendiktean internal organisasi yang lebih tinggi dari strukturnya. Dalam hal ini kita perlu membedakan antara seruan dan perintah. Juga karena sifatnya yang otonom, maka prasyarat utama untuk itu adalah desentralisasi status organisasi;

2. **Kolektif,** artinya setiap kerja organisasi sebisa mungkin dilaksanakan bersama untuk kepentingan bersama karena memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama pula;

3. **Egalitarian,** artinya struktur organisasi berbentuk non-hierarkis yang didalamnya setiap anggota punya kesempatan yang sama dalam kerja dan pengambilan keputusan, dan saling menghormati dalam suasana kesetaraan dan persaudaraan tanpa memandang latar belakang primordial, gender dan fisik;

4. **Voluntiristik,** artinya setiap kerja organisasi dilaksanakan oleh orang-orang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, dengan demikian kerja kesukarelaan harus dibedakan dengan penugasan, inisiatif individu diakomodir dan didukung selama tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan organisasi;

5. **Mutualis,** artinya setiap kerja-kerja organisasi yang dilakukan bersama, harus saling melengkapi, membutuhkan dan menguntungkan (inter-dependensi); dan

6. **Konsensus,** dalam pengambilan keputusan terkait arah dan kerja organisasi sebisa mungkin dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil hingga semua "peserta rapat" menyetujuinya.

PARA TODOS, TODO

EVERYTHING FOR EVERYONE

MUTUAL AID

MUTUAL AID

Sebelum itu, mari kita sederhanakan prinsipnya menjadi satu entitas sederhana namun memiliki manifestasi yang kuat.

Melengkapi penjelasan pada sub-bab sebelumnya, tiap-tiap pijakan prinsip terkait kemudian dapat menjadi sebuah pedoman penting yang harus selalu tertancap pada tiap-tiap pikiran anggota komunitas egaliter. Pada akhirnya, untuk memudahkan konsep pijakan prinsip terkait, penyederhanaan skema akan tiap-tiap prinsip tersebut penting untuk kemudian dapat ditabulasi; dalam hal ini saya menyederhanakannya melalui konsep Mutual Aid.

Terminologi dan Latar Belakang

Dipopulerkan oleh teoris anarkis Peter Kropotkin, berdasarkan ide Kessler di akhir abad ke-19, konsep mutual aid membuka potensi baru untuk restrukturisasi hubungan kita dengan kerja dan dengan satu sama lain. Asasnya adalah kepercayaan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diraih melalui persaingan, melainkan melalui saling bantu. Dalam kerangka mutual aid, masing-masing orang berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan kolektif suatu kelompok. Konsep ini mungkin tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Semangat yang sama mengalir dalam seruan gotong royong yang berbasis

menanggung beban serta kerja secara kolektif. Namun mutual aid tidak sebatas mendorong kita untuk bekerja secara kolektif, tapi merombak pemaknaan kita atas kerja, dan peran setiap orang dalam kerja tersebut.

Salah satu landasan mutual aid adalah persetujuan semua pihak. Inilah yang menempatkan mutual aid jauh dari tuduhan “perbudakan”. Landasan lainnya adalah kesetaraan, dimana semua orang memiliki kuasa yang sama. Lalu, tentunya ada prinsip relasi timbal balik. Inilah yang membedakan mutual aid dari kerelawanan atau kerja sukarela lainnya. Dalam kerja relawan, hasil dari kerja masih satu arah (dari pekerja ke penerima manfaat); sementara dalam mutual aid, terdapat relasi dan dinamika mutual antar setiap orang yang terlibat.

Akan tetapi, mutual aid hanyalah menjadi bagian dari omong kosong belaka jika tidak memiliki antologi yang kuat akan dasar penciptaan dan pengupayaan habitusnya. Karena mutual aid bukanlah merupakan hasil dari cita-cita, melainkan hanya sekadar pedoman untuk menggapai hingga menciptakan cita-cita egaliter yang solid.

Manifesto Mutual Aid

Layaknya cita-cita utopis milik para kaum anarkis, mutual aid merupakan konsep yang mengandung metode yang dinamis – dalam artian, bahwa metodolgi mutual aid

dapat digunakan berdasarkan situasi dan kondisi yang selaras dengan era serta zamannya. Maka dari itu, upaya penciptaan habitus mutual aid tidaklah dogmatis, namun bersifat *bottom-up* terhadap hak lahiriah dan batiniah manusia – karena upaya penciptaannya yang membutuhkan wacana aspirasi, kritik, dan solusi. Maka dari itu, mutual aid tidak seharusnya dengan sengaja diciptakan, melainkan harus dari kesepakatan bersama yang mendorong subjek komunitas untuk dapat membantu tiap-tiap jiwa manusia satu sama lainnya.

Namun, hingga kini, jarang ada manusia (atau bahkan dari kita) menyadari manifestasi terbentuknya konsep mutual aid yang memiliki alasan kuat melalui basis kritik terhadap relasi kuasa yang memiliki hegemoni atas segala akses dari tiap-tiap sektor yang dapat memengaruhi kebutuhan dan hak baik domestik maupun logistik milik rakyat seutuhnya.

Jika melihat ini secara kasuistik, melalui pendekatan ekonomi-politik; terang dan terbukti sudah bagaimana kemudian peran negara bahkan tereduksi oleh Imperialis dunia yang mendikte negara setengah jajahannya baik secara implisit maupun eksplisit. Pasar neoliberal yang dikendalikan oleh Imperialis pada akhirnya tidak dapat menjangkau kepentingan domestik bahkan logistik masyarakat kelas menengah kebawah. Pada akhirnya, berdasarkan pandangan moralisme, mutual aid dibutuhkan bagi para masyarakat tertindas untuk dapat membangun swa-kelolanya; lebih-lebih dalam tataran

komunitas dari berbagai macam aras nama. Hingga kini, corak mutual aid selalu dipraktikkan walau hingga bahkan tanpa legitimasi teorinya. Karena mutual aid hidup didalam tiap-tiap jiwa manusia yang mengerti arti "manusia".

Akan tetapi mutual aid akan selalu menjadi corak yang repetitif bak kosong cita-cita bagi keadilan masyarakat sosial yang sejati jika tidak mengandung nilai perjuangan untuk menghancurkan sistem induk yang membuat negara cenderung mempraktikkan silent treatment terhadap rakyatnya sendiri. Agenda mutual aid harus memiliki tujuan untuk saling menghidupi satu sama lain yang selaras pula dengan agenda penyadaran dan pengorganisasian agar manusia yang saling menghidupi akhirnya dapat mengubah namanya menjadi pejuang yang saling menghidupi.

Fase-fase Praktis Mutual Aid

Berdasarkan penjelasan terkait, maka dengan ini, saya selaku penulis cenderung memberikan ruang dialektika terhadap keberlakuan upaya penciptaan habitus mutual aid.

Dengan melihat, merasakan, hingga mengalami langsung gejolak ekonomi-politik yang terjadi sehingga menciptakan arus kebudayaan neoliberal dan era pemikiran *post-truth*; maka hal ini seharusnya dapat dilihat sebagai antitesis yang dibenturkan oleh epistimologi dari mutual aid. Hingga pada akhirnya,

praktik mutual aid pada era *post-truth* sendiri melahirkan corak melalui metode baru selain hanya sekadar membantu satu sama lain dan menjaga hubungan mutualis antar jiwa-jiwa manusia. Maka internalisasi praktik mutual aid terhadap tiap-tiap manusia memiliki fasenya masing-masing.

Terdapat 2 (dua) jenis fase upaya penciptaan komunitas egaliter yang bersandar pada mutual aid; yaitu: (1) Fase Mekanik; dan (2) Fase Meta-Mutualis.

1. **Fase Mekanik:** merupakan fase dimana subjek sekadar mengetahui hingga bahkan mempraktikkan mutual aid sebagai salah satu upaya untuk menghidupi satu sama lain.

2. **Fase Meta-Mutualis**: merupakan fase dimana subjek menyadari bahwa mutual aid dalam hal membantu dan menolong satu sama lain tidak akan pernah selesai jika tidak melihat hal terkait secara kasuistik melalui kausalitas fenomenologi.

Mungkin sulit jika hanya sekadar mengetahui, saya tidak ingin saudara/i pembaca sekalian mengalami kecelakaan berpikir. Agar lebih mengerucut dan mengetahui manifesto apa yang saya maksud, mari kita komparasikan kedua fase ini. akan tetapi sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa fase-fase terkait bukanlah bagian dari diskredit tindakan, melainkan hanya sekadar

untuk menilai level kesadaran berorganisasi dan manifesto berjuang dalam hal membersihkan konsep mutual aid dari cita-cita strategis. Dengan tegas, saya nyatakan bahwa mutual aid merupakan metode dan pedoman hidup yang dapat dipilih oleh manusia. Mutual aid bukanlah ideologi.

Perbandingan Fase

Letak perbedaan antara fase mekanik dengan fase meta-mutualis terdapat pada basis pendekatan apa yang digunakan oleh subjek pertama kali untuk mempraktikkan mutual aid. Fase mekanik cenderung menggunakan basis pendekatan emosional – maka dari itu gerakan mutual aid pada fase mekanik memang terang terlihat sebagai gerakan moral. Melihat orang yang miskin, kawan yang sedang kelaparan, kehabisan bensin hingga membuatnya tidak bisa berangkat kuliah memanglah lumrah untuk dibantu, bahkan bagi mereka yang tidak menerapkan mutual aid sebagai pedoman hidup sekalipun. Akan tetapi, kelemahannya ada pada upaya pencarian sebab-akibat dari persoalan terkait. *"Siapa induk permasalahannya?"*

Alasan praktik dari mutual aid pada fase mekanik semata-mata dikarenakan oleh basis berpikir yang cenderung moralis hingga terlihat naif. Katakan seperti bagaimana konsep *gotong royong* bekerja; antar manusia hanya sekadar membantu satu sama lain (lebih-lebih karena memiliki bobot struktural dari latar belakang etnis) karena alasan subjek pertama sedang mengalami suatu persoalan yang menyulitkannya hingga subjek kedua

hadir untuk membantunya sebisa mungkin. Bahkan dari habitus demikian yang kemudian dipelihara secara pragmatis, ada pula manusia yang melakukan hal demikian secara momentum agar mendapatkan perhatian publik hingga berharap derajat kelasnya dinaikkan.

Kelemahan mutual aid fase mekanik terletak pada upaya pencarian sebab-akibat secara materialisme dialektika historis dengan menerapkan metode kausalitas dalam hal pencarian faktanya; karena memang tidak ada latar belakang pemikiran basis ekonomi-politik. Berbeda dengan fase meta-mutualis yang berarti "Lebih dari hubungan mutual", fase meta mutualis terjadi ketika subjek dalam fase mekanik menyadari bahwasannya permasalahan konkret terletak pada kausalitas sosialnya. Maka dari itu, fase meta-mutualis cenderung memiliki karakter pendekatan yang bersifat politis dalam ranah basis kasuistik.

Tidak seperti mutual aid mekanik yang cenderung memasang hubungan moralis sebagai pion praktisnya, meta-mutualis cenderung dianggap sebagai gerakan politik karena manifestasinya yang kuat akan watak dari gerakan egaliterian. Secara kausalitas dari realita sosial, upaya untuk membantu satu sama lain secara berkala hanya akan membuat para pelaku mutual aid bekerja layaknya buruh: berulang-ulang, membosankan, bahkan hingga rela menjadi altruis yang lebay. Negara sebagai komunitas skala besar yang tentunya membutuhkan peran rakyat dalam agenda politik bahkan cenderung buta

terhadap kesengsaraan rakyat dari berbagai macam persoalan struktural.

Misalnya, apa penyebab utama dari persoalan kawan kita yang sedang kehabisan bensin ditengah dia yang sedang ingin berangkat kuliah? Mungkin akan ada beberapa kemungkinan, akan tetapi memang baik untuk diinvestigasi terlebih dahulu secara personal. Pendekatan kausalitas secara total melalui basis ekonomi-politik akan memiliki pandangan bahwa kawan kita tidak dapat membeli bensin dikarenakan kemampuan orang tuanya yang tidak dapat membiayai hidupnya di tanah rantauan secara penuh; hal ini lagi-lagi berkaitan dengan krisis lapangan pekerjaan yang ditimbulkan oleh agenda ekonomi-politik penguasa yang mampu menjaring seluruh hak dan kepentingan rakyat kecil. Maka solusi yang ditawarkan oleh pelaku mutual aid yang menggunakan pendekatan politis adalah: *"melalui berbagai macam kemungkinan dan metode, ayo hancurkan induknya! Para hegemon!"*. Atau mungkin paling tidak, si subjek memanglah diberikan uang saku bulanan yang cukup, hanya saja ia yang tidak dapat mengelola pengeluarannya hingga sewaktu-waktu nanti, ia harus berhadapan dengan krisis pribadinya. Maka solusi yang dapat diberikan adalah: memberikan pelayanan bimbingan mengenai cara untuk mengelola pengeluaran agar tetap dapat bertahan hidup. Karena, dalam fase meta-mutualis, pelaku mutual aid tidak akan mungkin memberikan solusi praktis kepada subjek lainnya, upaya penggerakan dan pendisiplinisasian terhadap subjek yang problematis merupakan cara

bagaimana kemudian mutual aid tidak memanjakan para korban, akan tetapi membuat korban dapat digerakkan untuk meningkatkan daya juangnya dalam hal menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa merepotkan orang lain – hingga dapat menjadi pelaku mutual aid selanjutnya dikemudian hari.

Saya harap analogi terkait yang telah saudara/i baca tidak begitu jauh untuk kembali menelanjangi mutual aid fase meta-mutualis. Kembali pada tataran ontologi mutual aid yang sejati, mutual aid tercipta karena kekecewaan rakyat menengah kebawah untuk dapat berharap kepada penguasa yang memiliki segala akses dari segala segala sektor; maka masyarakat yang tidak terjaring oleh pelayanan publik pemerintah cenderung membuat swa-kelola komunitasnya agar dapat bertahan hidup – dengan catatan, mereka yang terhimpun dan menjalankan skema mutual aid tidak pernah lupa akan musuhnya, yaitu para penguasa, hegemon, kapitalis birokrat, borjuasi besar komprador, hingga imperialis yang kemudian mengubah nasibnya menjadi miskin terhadap "sektor" ekonomi-politiknya. Mereka tentunya tidak bisa berharap kepada "musuhnya". Maka sifat dari mutual aid pada hakikatnya sendiri adalah: mereka yang tergabung didalam komunitas yang sepakat akan cita-cita kosmopolitan dengan mengonsumsi konsep mutual aid agar dapat mandiri dan terlepas dari hegemoni kekuasaan yang menindasnya.

Konversinya dalam tataran komunitas paguyuban (baca: PMJ) adalah memang betul-betul membantu satu

sama lain, akan tetapi kita haruslah terhimpun dan terorganisir satu sama lain. Karena mutual aid bicara mengenai kesepakatan, dan siapa yang sepakat harus membantu serta saling membantu.

MARI BICARA LANGKAH TAKTIS

MARI BICARA LANGKAH TAKTIS

"Okay! Saya sudah tidak sabar hidup bersama orang-orang yang memiliki status sama seperti saya!" Ucap mahasiswa perantau gegabah yang memiliki semangat organisasi yang masih meledak-ledak.

Upaya penghimpunan dan pengorganisiran yang metodologis sesungguhnya sangat bergantung pada dua hal; ***pertama***, berpijak mutlak pada prinsip yang sudah disepakati (dalam hal ini memiliki status egaliter); ***kedua***, bersandar pada situasi kasuistik terhadap tiap-tiap lingkaran sektoral-temporal – misal: keberlakuan metode tertentu hanya dapat dilakukan pada angkatan yang tentunya secara situasional berjalan selaras dengan era dan perkembangan zaman secara kebudayaan serta ekonomi-politik komunitas praktis.

Problem Mutlak Subjek Pengorganisiran

Saat ini kita menghadapi permasalahan urbanisasi yang menyebabkan ketidakmerataan penyebaran populasi penduduk. Menjadi sangat banyak di suatu wilayah namun sangat sedikit di wilayah yang lain. Prediksi sosio-politik dikemudian hari akan menunjukan bahwa kecenderungan ini akan menjadi lebih besar lagi akibat desakan spesialisasi dan regionalisasi sektor ekonomi kapitalisme.

Hal ini juga berpengaruh kepada sistem pendidikan kita. Perguruan tinggi yang berkualitas dan besar (jika memang benar demikian), terpusat di Jawa. Pun, walau di Jawa, sebenarnya hanya tersebar di beberapa kota besar. Sehingga di satu kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta misalnya, akan terdapat puluhan perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa. Maka dari itu, tidak akan ada ukuran yang pasti mengenai 'siapa saja' atau bahkan 'berapa' orang yang akan menjadi target penghimpunan dan pengorganisiran – target utama kita memang bukanlah mencari sebanyak mungkin anggota, tetapi kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa mahasiswa perantau di Pulau Lombok akan bergabung dalam komunitas paguyuban (baca: PMJ) suatu saat nanti. Model organisasi konvensional seperti dapat kita saksikan pada kebanyakan organisasi saat ini, terbukti tidak akan bisa egaliter dengan kondisi seperti itu. Karena itu kita perlu mengenalkan model organisasi yang baru: sebuah organisasi horizontal untuk suatu wilayah yang luas bagi kota-kota besar.

Semakin banyak dan tersebar anggota paguyuban, maka kerja organisasi dan pengambilan keputusan akan menjadi tidak efektif dan efisien, yang justru akan berujung pada stagnansi dan penyerahan kerja pada semakin sedikit individu. Organisasi yang ideal adalah yang anggotanya berada dalam jarak strategis yang memungkinkan terjadinya pertemuan tatap muka secara berkala, akan lebih baik jika sudah saling mengenal pula; dengan kata lain, model organisasi kita menuntut heterogenitas sifat dan karakteristik bentuk subjek (baca:

mahasiswa perantau) sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah.

Praksis Pengorganisiran

Di Rojava, rakyat mengorganisir dirinya secara langsung dalam komune-komune dan membentuk dewan-dewan; setiap komune mengirimkan delegasi terpilih ke dewan-dewan. Dewan kampung mengirim delegasinya ke kota, dewan kota mengirim delegasinya ke kota yang lebih besar, dan seterusnya. Setiap komune merupakan entitas mandiri, namun mereka terhubung satu sama lain melalui struktur konfederal yang bertujuan untuk koordinasi dan melindungi kepentingan publik. Ketika permasalahan tak bisa diselesaikan di level bawah, atau melampaui urusan dewan di tingkatan terendah, mereka mendelegasikannya ke tingkatan berikutnya. Instansi yang "lebih tinggi" haruslah akuntabel terhadap yang "lebih rendah" serta melaporkan setiap keputusan dan tindakannya.

Kembali pada topik sektoral, untuk Kota Mataram misalnya, yang hanya memiliki dua kampus berukuran besar (Unram dan UINMa), satu paguyubani tanpa pemecahan apapun (tentunya dengan nama aras organisasi yang dapat digeneralisir; misal: PMJ Mataram) saya kira sudah cukup. Hal ini mungkin akan sulit untuk dilakukan di Yogyakarta. Paguyuban tersebut cenderung harus dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, bisa berupa unit di satu kampus UGM, satu lagi di UNY, dan satu di UMY. Karena itu sifat dari bentuk komunitas

mahasiswa (dalam hal ini paguyuban) di Yogyakarta harus didesentralisasi. Kolektif-kolektif ini akan melakukan kerja dan pengambilan keputusan yang otonom. Bahkan jika memang diperlukan, kolektif di satu perguruan tinggi bisa dipecah lagi berdasarkan fakultas. Dengan demikian dalam situasi macam ini, akan ada struktur tiga jenjang dalam konfederasi di Yogyakarta: aras kota, aras universitas dan aras fakultas. Unit ini perlu kita berikan nama, bisa saja kolektif, majelis, dewan, kongres. Misalnya, PMJ UAD atau Komite Paguyuban Fakultas Filsafat UGM. Namun nama adalah urusan sepele, sangat artifisial dan bisa disepakati saat kongres komunitas untuk yang pertamakalinya.

Aras dalam struktur seperti ini jangan disamakan seperti organisasi reaksioner yang sentralistik dan komandoisme anti otonom dengan hierarki yang menindas; sebab dalam masyarakat egaliter, yang dicitacitakan itu, tidak mungkin kita melakukan pertemuan langsung dalam skala yang lebih luas tanpa adanya lembaga sosial yang dapat memenuhi aspirasi kelas pekerja. Anarkis di Rusia misalnya mengembangkan Komunisme Dewan dalam bentuk soviet-soviet, ketika rakyat secara mandiri dan bersama-sama mengambil keputusan terkait urusan-urusan produksi dan publik. Tetapi Uni Soviet yang dipimpin Lenin sebenarnya jauh dari apa yang dimaksud dengan “soviet” yang sebenarnya. Segera setelah Bolshevik berkuasa, soviet-soviet tersebut segera ditundukan dengan pemerintahan yang tersentralisir. Kekuasan soviet-soviet tetap bertahan

beberapa tahun, dan Bolshevik membutuhkan kerja keras untuk membalik alur perintah dari bawah (*bottom-up*) ini menjadi dari atas (*top-down*).

Kembali pada topik sub-bab; maka dari itu, metode, teknis, taktis, serta upaya pengorganisiran tidak dapat disamakan dari tiap-tiap era. Kemajemukan karakter dan sifat manusia tidak dapat disamakan – lebih-lebih dengan analisis Zodiak, haha! Konyol.

Metode Milik Angkatan Putih PMJ

Metode penghimpunan dan pengorganisiran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, angkatan putih PMJ melakukan metode penghimpunan dan pengorganisiran dengan mengedepankan pendekatan emosional karena karakter dan sifat massa yang dihimpun oleh para angkatan putih PMJ memiliki watak yang abstrak dan cenderung tidak memiliki pengalaman organisasi progresif, maka dapat dipastikan bahwa target pengorganisiran mahasiswa perantau pada masa itu jarang ada yang terhimpun dalam organisasi politik pergerakan hingga tidak memiliki pengalaman melawan skema politik praktis dan politik etis – tidak ada target organisir yang mengerti kompromisme politik. Angkatan putih PMJ tidak perlu repot-repot memutar otak untuk menghimpun target pengorganisiran pada saat itu; tidak ada pendekatan politis sama sekali, semuanya dibentuk dari kesadarn kolektif praktis yang cukup mengedepankan praktik bahkan tanpa teori-teori rumit. Akan tetapi, pasca era

kepengurusan angkatan putih PMJ, muncul bentuk pragmatisme terhadap angkatan putih PMJ oleh angkatan PMJ selanjutnya. Keberhasilan angkatan putih PMJ pada saat itu pada akhirnya memberikan ruang sektarianisme; metode pendekatan yang dilakukan oleh angkatan berikutnya cenderung sama dan tidak variatif. Bahkan muncul banyak skema-skema diluar kemungkinan-kemungkinan situasi organisasi yang telah sebelumnya pernah diproyeksikan. Subjektifisme, sektarianisme, hingga oportunisme pada akhirnya timbul dan menjadi penyakit organisasi pertama kali milik PMJ. Banyak kepala yang percaya diri akan ide serta gagasan evolusionernya terhadap PMJ, akan tetapi, karena tidak ada upaya untuk mengikis hasrat borjuasi dari tiap-tiap anggota, jarang ada anggota PMJ yang dapat saling menghargai ide yang berbeda; PMJ melupakan sisi kemungkinan kemajemukan anggota yang terhimpun. Hal ini yang kemudian seharusnya dapat menjadi antitesis terhadap watak organisasi PMJ kedepannya; *direct critic* ini mengharapkan praktik, metode, serta segala hal yang berkaitan dengan upaya penghimpunan dan pengorganisiran yang lebih maju dan solutif secara praktis.

KONSEKUENSI

KONSEKUENSI

"Kami membutuhkan langkah lebih lanjut. Bentuk eksekusi setelah prinsip dan gambaran umum." Dasar gegabah! Siapa suruh jadi agen penghimpun mahasiswa perantau.

Merujuk pada akhir pembahasan sub-bab sebelumnya, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa berpijak pada prinsip dan bersandar pada situasi temporal merupakan hal penting; mengapa demikian? Upaya penghimpunan dan pengorgansiran tidak mungkin akan bisa semulus yang dibayangkan, selicin teori yang sudah dipikirkan. Maka kita juga perlu memiliki proyeksi konsekuensi yang kontekstual.

Alih-alih tetap melanjutkan program, massa abstrak cenderung melihat kegagalan sebagai hal yang diluar jalur rencana taktis (baca: plan). Jika bicara mengenai simulasi konsekuen, tentunya kita akan memaklumi kegagalan kecil adalah bagian dari proyeksi kita. Maka tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk tetap berdiri pada upaya penyuksesan program kerja. Bahkan kita dapat melihat kegagalan merupakan bagian dari penghubung plan selanjutnya; proyeksi kegagalan dapat dianggap sebagai ladang keberlanjutan agar tetap dapat melaksanakan program yang kontinu.

Problem Operasional ProgramAngkatan Putih PMJ

Akan ada banyak permasalahan yang cenderung kekanak-kanakan ketika program kerja komunitas berjalan, angkatan putih PMJ sudah banyak mengalami hal tersebut. Tidak menutup kemungkinan, tiap-tiap angkatan akan mengalami hal yang sama dan konteks problem yang berbeda-beda pada setiap era-nya. Saya tidak sama sekali berusaha untuk melemahkan semangat saudara/i penghimpun sekalian, tentu ini objektif, silakan uji itu secara dialektis.

Kembali pada pembahasan, maka dari itu, memberikan ruang untuk memungkinkan kegagalan dan mengukur konsekuensi merupakan hal yang sangat perlu dipertimbangkan.

Sebelumnya bukan bermaksud arogan, lagi-lagi karena saya selaku penulis merupakan bagian dari angkatan putih PMJ, maka saya tidak bisa melepaskan hasil praktik saya sebagai bagian dari pengalaman pengorganisiran yang pernah saya lakukan. Layaknya gading yang suatu saat akan retak, angkatan putih PMJ pernah menelan kegagalan total dalam hal penentuan pejabat strategis dan politis. Terang dan tidak perlu ditutupi, pekerjaan pejabat politis PMJ tidak semulus apa yang direncanakan; pada saat itu, PMJ memiliki 4 (empat) *direct division* (pejabat strategis) dan 3 (tiga) pejabat politis , antara lain: Divisi Hubungan Masyarakat; Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa; Divisi Komunikasi dan Informasi; Divisi Penelitian dan Pengembangan; Bendahara; Sekretaris Umum; dan Ketua.

Angkatan putih PMJ cenderung mengangkat para pejabat politis dan strategis karena desakan internalisasi visual seakan organisasi harus selayak organisasi pada umumnya hingga menghilangkan pokok-pokok pembangunan organisasi itu sendiri; lebih-lebih angkatan putih PMJ memiliki penilaian untuk pengangkatan pejabat politis dan strategis dengan tidak objektif dan sangat gegabah – masing-masing pejabat memiliki kesibukan pokoknya dan mengesampingkan PMJ sebagai organisasi pokok mengingat PMJ baru saja memulai dan merintis eksistensinya. Alhasil, tiap-tiap pejabat strategis tidak mampu melaksanakan tugas pokoknya, sedangkan pejabat politis tidak memaksimalkan kapasitas pekerjaan pembangunan organisasi.

Pekerjaan kemudian dilakukan secara voluntiristik yang bersandar pada kesadaran organisasi secara organik, hingga dalam upaya konsolidasi internal, angkatan putih PMJ memerlukan banyak bahan bacaan untuk menunjang teori pembentuk kerangka praktik yang nantinya akan diimplementasikan. Mulai dari menghitung kekuatan pekerja sukarela, menerapkan konsep egaliter-emosional layaknya kaum *Anarcho Collectivist*, hingga menetapkan penilaian anggota agar dapat dipercaya sebagai barisan solid yang nantinya akan membentuk struktur komite solid. Angkatan putih PMJ lagi-lagi harus bekerja dua kali sebagai komite persiapan, lebih-lebih cenderung terlihat seperti komite persiapan pembentukan organisasi rintisan.

Rekonsentrasi Sebagai Alat Pemaksa

Setumpuk pecutan tersebut akhirnya memberikan pelajaran yang wajib ditelan oleh angkatan putih PMJ. Mulai dari manifesto pejabat politis dan strategis, angkatan putih PMJ mulai mempertanyakan urgensi dari beberapa *direct division*. Alhasil angkatan putih memulai eksperimen untuk menghapus beberapa *direct division* seperti Divisi Hubungan Masyarakat yang pekerjaannya dapat digantikan oleh Ketua langsung dalam hal konsolidasi eksternal dan membuka gerbang kolaborasi dengan lembaga lain – Ketua PMJ akhirnya cenderung dilihat dan bekerja layaknya wajah PMJ; ya, tentunya beroperasi lebih egaliter. Adapula tanggung jawab Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang dileburkan dengan Divisi Penelitian dan Pengembangan akhirnya dibebankan kepada Sekretaris Umum; hal ini berkaitan dengan dengan upaya konsolidasi internal, penilaian personal tiap-tiap anggota melalui pendataan manual dan investigasi sosial yang berbasis pada disiplin ilmu psikoanalisis; dengan ketentuan: segala tanggung jawab Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang dileburkan dengan Divisi Penelitian dan Pengembangan yang dibebankan kepada Sekretaris Umum hanya sebatas laporan pertanggungjawaban secara formil, tanggung jawab operasional tetaplah diemban bersama dan menjadi kewajiban bersama. Hal tersebut kemudian melahirkan etos kerja penghimpunan dan pengorganisiran yang bobot pekerjaannya ditanggung bersama. Tiap-tiap anggota PMJ wajib menghimpun dan mengorganisir tiap-tiap mahasiswa perantau asal Jabodetabek dan sekitarnya.

Sesungguhnya terdapat banyak pengalaman yang lebih lanjut tidak dapat saya tuangkan didalam seonggok *manual book* ini, akan tetapi lebih baik saya membuat *manual book* autobiografi tentang angkatan putih PMJ jika demikian. Singkat, kegagalan yang pernah dikulum oleh angkatan putih PMJ merupakan antitesis yang akhirnya dapat melahirkan bentuk sintesa yang mungkin dapat dianggap solutif bagi kami pada saat itu.

Hal ini-lah yang kemudian saya maksud sebagai dialektika perkembangan organisasi. Iklim organisasi pastinya akan memiliki usia kolot-nya dan usia progresifnya, hal demikian dapat dilihat dari laju perkembangan program organisasi; iklim konsolidasi internal organisasi; hingga corak organisasi yang cenderung dilihat seperti organisasi yang sakit karena titik jenuhnya. Revolusi corak berpikir sangatlah diperlukan untuk membentuk variasi pembangunan organisasi yang lebih majemuk.

KITA TIDAK REAKSIONER

KITA TIDAK REAKSIONER

Perbedaan PMJ sebagai komunitas paguyuban egaliter adalah penentuan keputusan yang menjadi kedudukan bersama; Konsensus yang menerapkan demokrasi total sebagai metode taktis 'adalah kunci'. Tidak ada yang mendominasi, karena etika politik borjuasi dilarang hidup!

Subjektifisme

Permasalahan kekanak-kanakan yang sering terjadi (mungkin akan selalu hidup) adalah subjektifisme, bagaimana kemudian penilaian yang ditinjau dari satu subjek secara umum dengan mengesampingkan situasi dan kondisi kasuistik yang mendukung penilaian kontekstual menjadi lumrah. *Bocah!* Sulitnya angkatan putih PMJ membendung perkara subjektifisme antar anggota menjadi "kutu kecil" yang dapat berpotensi mengganggu pekerjaan program. Tentunya banyak yang jengkel nan jenuh dengan persoalan kekanak-kanakan ini. seperti yang dikatakan oleh Kawan Algar Engkong: *"Gue mau bilang main lo pada kurang jauh tapi lo pada udah nyampe di Lombok"*. Adanya subjektifisme didalam tubuh organisasi terlebih yang memiliki bentuk komunitas egaliterian semata-mata didasari pada adanya gejolak hingga bentrokan masif antar kepentingan individu yang menghadapkan mereka dengan persoalan struktural; karena bicara mengenai jabatan, prinsip yang telah ditelan oleh para koordinator organisasi seharusnya sudah lebih egaliter dari karakter organisasinya.

Situasi keperantauan yang pada akhirnya harus diterima oleh para perantau seharusnya dapat menjadi alasan untuk paling tidak bersikap dan berpikir lebih dewasa. Hal demikian dapat tetap nyaman pada garis tenangnya karena tidak ada upaya pengikisan hasrat borjuasi individualistik (hasrat ingin dikenal dan hasrat ingin memiliki, keduanya berlaku secara total dan terasa tamak). Hal ini juga dapat dinilai dari bagaimana kemudian para kakak rantau tidak komprehensif dalam hal pemberian materi dan pembukaan ruang-ruang diskusi didalam organisasi PMJ untuk memberikan "segelas air" mengenai skema kehidupan komunal yang tidak boleh individualistik; lagi-lagi harus saya singgung mengenai kebiasaan sektarianisme terhadap praktik angkatan putih PMJ yang diterapkan oleh angkatan-angkatan selanjutnya. Pendekatan emosional yang pernah dilakukan oleh angkatan putih PMJ pada akhirnya mengamini komandoisme struktural yang diterapkan oleh para adik rantau pasca era kepengurusan angkatan putih PMJ; hilangnya penilaian konstruksi sosial melalui upaya penghimpunan dan pengorganisiran dari pendekatan politis pada akhirnya tidak melahirkan nilai-nilai profesionalitas pekerjaan dalam memandang anatar anggota.

Agar tidak ada kecelakaan berpikir, saya memberikan ruang dialektika antara prinsip voluntiristik dengan etos profesionalitas pekerjaan. Voluntiristik seharusnya dapat melahirkan kebudayaan dan kebiasaan pekerjaan yang lebih dekat secara emosional bagi tiap-tiap

anggota, karena ruang dan lingkaran habitus yang menjadi konsumsi sehari-hari seharusnya dapat mengamini skema "kenal satu sama lain lebih dalam", maka ketika anggota yang voluntaris sudah menemukan kliknya dalam hal manifesto untuk bekerja sesuai dengan program, profesionalitas pekerjaan seharusnya dapat timbul didalam mode kerja yang akan menjadi pedoman kerja bagi tiap-tiap anggota.

Kembali pada topik, penyakit kekanak-kanakan ini lebih lanjut tumbuh pada kalangan lingkaran-lingkaran sel dalam satu komunitas, biasanya dalam skema aktivitas rumpi atau gosip secara kolektif dan membenarkan segala konteks hanya pada satu sisi saja. Pada akhirnya hal ini mengganggu jalannya operasional organisasi. Hal kemudian paling kontroversial nan krusial adalah ketika organisasi perlu mengambil langkah dengan metode keputusan bersama yang cepat dan praktis hingga dapat menciptkan pemecahan problem yang solutif.

Konsensus Sebagai Wajah Demokrasi Total

Pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara reaktif ala organisasi reaksioner, segala pertimbangan harus ditentukan dari segala arah dan situasi objektif yang sedang berlangsung, lebih-lebih situasi terkait dapat memengaruhi eksistensi organisasi, misalnya, program organisasi hingga cita-cita strategis organisasi. Pengambilan keputusan haruslah dilakukan dalam unit paling kecil dari organisasi, melalui praktik

demokrasi langsung dengan mengutamakan konsensus, atau yang kita kenal sebagai musyawarah untuk mufakat. Konsensus adalah alternatif pengambilan suara yang dianggap rasional dan menjaga otonomi pribadi. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka perdebatan harus dihidupkan dengan mengutarakan alasan-alasan mendukung atau menolak. Jika dianggap terlalu runyam, maka papan tulis akan sangat berguna untuk mendaftar poin-poin keberatan. Jika poin tersebut bisa dipatahkan dan diberikan solusinya oleh pendapat lawan, maka ia dicoret. Usulan dengan poin yang dicoret paling sedikit tentu saja adalah solusi yang paling baik, walau tentu bukan saja yang terbaik. Bahkan jika perlu, hal-hal paling teknis juga bisa dibahas untuk menunjang pembenaran suatu usulan, hingga semuanya sepakat untuk sepakat.

Jika konsensus gagal dicapai, pemungutan suara (voting) dilakukan dengan keputusan yang diambil berdasarkan aturan suara mayoritas, yakni sedikitnya 51 persen mendukung, maka hasilnya akan disahkan. Namun sebisa mungkin, pemungutan suara harus dihindari, sebab mayoritas tidak lebih berhak untuk mendikte minoritas, bahkan minoritas yang terdiri dari satu orang sekalipun, demikian pula sebaliknya minoritas terhadap mayoritas. Ia justru bisa mengarah kepada dictator by majority, terutama jika terdapat kubu- kubu “tanpa bentuk” di dalam organisasi.

Dalam konsensus, isegoria, hak universal untuk berbicara di dalam pertemuan, perlu dijunjung tinggi. Semua segi isu, argumen dan kontra-argumen akan

diperdengarkan selengkap mungkin. Organisasi yang egaliter menjanjikan kebebasan yang tidak hanya mengijinkan debat, tetapi mengembangkannya. Organisasi egaliterian adalah institusi dimana forum-forum diskusi dan debat akan terbuka bagi ekspresi sepenuhnya dari semua sudut pandang.

Konsensus memiliki poin kelebihan, yaitu lebih sesuai dalam organisasi yang anggotanya sangat akrab satu sama lain. Namun dalam pertemuan yang lebih heterogen, perkelahian bisa saja terjadi, dan ini memiliki potensi menjadi permasalahan serius. Bagaimanapun juga, cara yang lebih bermoral adalah ketika suatu keputusan sudah disahkan, ia juga harus dibarengi peluang mengubah keputusan pada masa mendatang. Mereka yang merasa pendapatnya kalah, perlu membangun kontra-argumentasi disertai dengan bukti-bukti bahwa pendapatnya benar dan tepat, sera menghancurkan pendapat lawan, dalam pertemuan selanjutnya. Sebab suatu keputusan yang mengikat dan bersifat tetap dalam jangka waktu lama adalah tidak mungkin. Situasi dan kondisi menentukan bagaimana kita berpikir dan bertindak, perubahan situasi akan membawa perubahan terhadap cara kita berpikir dan bertindak pula.

Bagaimanapun juga saya percaya bahwa konsensus, kemungkinan besar bisa terus dicapai dalam banyak situasi dan arah kondisi. Akan aneh jika konsensus sulit tercapai. Jika demikian, maka hal yang sedang dibahas itu perlu ditinjau kembali. Apakah memang hal tersebut memang perlu dibahas? Jangan-jangan justru hal

tersebut malah mengganggu kebebasan anggotanya atau bertentangan dengan tujuan organisasi.

AYO MASUK PMJ!

AYO MASUK PMJ!

Tidak sesederhana mengajak kawanmu untuk nongkrong dan ngopi bersama.

Kritik Terhadap Praktik Reaksioner

Entah sejauh mana praktik saudara/i pembaca, pada titik ini, cenderung akan lebih mudah bagi saya jika saya selaku penulis mengeneralisir bahwa kita semua yang sedang bergelut pada sub-bab ini adalah agen penghimpunan dan pengorganisiran saudara seperantauan; lebih-lebih saya mengharapkan militansi saudara/i pembaca terhadap eksistensi PMJ – organisasi egaliter. Kontradiksi ditemukan! Apa bentuk konkret militansi anggota PMJ yang kita harapkan? Sekedar menghimpun dan mengorganisir saudara seperantauan? Atau lebih-lebih menciptakan nilai arogansi eksistensi organisasi primordial yang terkenal akan status ‘kota metropolitan’-nya?

Maka pertanyaan yang tepat sebelum kita bertanya kepada para subjek saudara seperantauan yang akan dihimpun adalah: *“bagaimana cara anda menanyakan tujuan masuk PMJ kalau anda sendiri adalah orang yang pernah ditanya demikian?”*. Percaya kepada saya, tidak akan ada jawaban organik lainnya selain: *“saya ingin bergabung karena ingin mengenal saudara-saudara seperantauan saya di berbagai lini dan usia di tanah rantauan saya”*. Saya menawarkan pertanyaan lain!

“bagaimana cara anda menanamkan nilai orientasi bergabung PMJ kepada para target subjek penghimpunan? Dengan menggiring logika?”.

Penghimpunan, Pengorganisiran, dan Nilai Seni

Saya sedikit mengutip beberapa ajaran dari Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang memiliki orientasi bahwa politik (baca: kepemimpinan proletariat) adalah panglima dengan pandangan realisme sosialis; bahwa “seni untuk seni” (seni yang menciptakan nilai seni) hanya akan mengamini karakter karya seni yang membosankan, sedangkan “seni untuk rakyat” (seni yang diperoleh dan dikonsumsi oleh rakyat) akan menciptakan nilainya sendiri – melalui aspirasi masyarakat. Maka dari itu, pandangan “seni untuk seni” yang berpijak pada janra Humanisme Universal yang cenderung ekspresionis cenderung menciptakan karya seni untuk mencari nilai; sedangkan seni untuk rakyat” telah menciptakan nilai seni nya sendiri melalui pandangan masyarakat yang menilai karya seni – maka dari itu realisme sosialis akan selalu memiliki nilai-nya ketimbang ekspresionisme yang seolah menuangkan ide dan pikirannya secara subjektif kedalam kanvas, dan memaksa nilai dapat memiliki tubuh yang sama dengan karya seni-nya.

Lantas apa hubungannya dengan (lagi-lagi) PMJ? Kita tidak mungkin melakukan penggiringan logika yang membentuk opini, karena hal tersebut merupakan bagian dari pengekangan berekspresi dan pandangan. Organisasi

yang egaliter harus menciptakan nilai-nya sendiri melalui aspirasi (lebih-lebih dari hasil kritik) masyarakat. Letak nilai PMJ nantinya akan diciptakan oleh keberadaan masyarakat sekitar. Kita tidak mencari nilai kita, seolah kita yang haus akan eksistensi dan pengakuan. Keberadaan PMJ haruslah menjadi alasan utilitas bagi masyarakat tanah rantauan; hal tersebut dibutuhkan agar dapat menciptakan iklim operasionall pekerjaan yang aktif, lebih-lebih tidak menciptakan pandangan arogansi dari status 'organisasi kota metropolitan' yang seolah dipandang berbeda dan memiliki kelas didalam suatu lingkaran. *"Membumi-lah di tanah rantauan mu, jangan sombong!"*.

"Bagaimana caranya? Dari hal terkecil, wahai saudara/i ku!". Praktik penghimpunan dan pengorganisiran haruslah pula menciptakan nilainya sendiri, tidak mencari dan haus akan pengakuan nilai tersebut. Memberikan pemahaman upaya mutualis antar saudara seperantauan menurut saya merupakan jawaban dari pertanyaan diawal sub-bab ini yang tentunya harus kita sadari dan praktikkan bersama-sama; akan tetapi hal demikian tidaklah begitu konkret. Karena pada akhirnya, diskursus yang kita ciptakan mengenai hal demikian hanya akan melahirkan jawaban yang *ngambang*. Sadar! Pada masa-masa awal kita dihimpun dan diorganisir (Calon Anggota PMJ) oleh anggota PMJ, kita semua tidak memiliki orientasi yang pasti untuk bergabung dengan PMJ! Maka dari itu, menggiring opini dengan memaksa

calon anggota harus menjadi militan PMJ merupakan hal yang *“nasi dimakan jadi tahi”. Bullshit.*

Kritik Terhadap Ekspresionisme Oportunis

Lantas bagaimana pandangan egaliterian dalam menyoal persoalan demikian? Slavoj Žižek, seorang *“Supertar of Marxism”* dari Slovenia dengan tegas juga sedikit memberikan kita pandangan bahwa internalisasi hasrat manusia kepada subjek lain merupakan hal tidak bisa dibenarkan. Bagaimana kemudian doktrin yang diterima oleh subjek yang dipengaruhi untuk dapat dipaksa menelan pandangan (atau bahkan doktrin) subjek yang memengaruhi. Misalnya, bagaimana kemudian seorang pencipta karya seni yang menciptakan karyanya dengan mengejar nilai dari karya seni tersebut melalui upaya pemaksaan aspirasi dan pandangan si pencipta karya seni terhadap si penikmat karya seni. Hasrat apa yang dikejar? Pada akhirnya si pencipta karya seni cenderung haus berat akan nilai yang ingin ia peroleh, nilai dari karya seni tersebut cenderung tidak lahir secara organik dari alasan diciptakannya karya seni terkait.

Nilai apa yang akan anda berikan terhadap suatu karya seni: sebuah pisang yang ditempel dengan lakban di atas kanvas – lebih-lebih *pisang lakban* tersebut di pajang di Museum *Louvre*, Perancis? Yang hanya mengerti esensi nilai seninya hanyalah si pencipta karya seni tersebut, bukan anda! Anda tidak akan mengerti nilai apa yang dimaksud dari sebuah mahakarya seni tersebut (baca: si

pencipta karya seni), akan tetapi nilai tersebut seolah dipaksakan sebagai karya seni yang indah karena nilai kapitalnya (baca: harga) yang cenderung mahal. Akhirnya internalisasi hasrat nilai karya seni tersebut memiliki ruang untuk masuk kedalam jiwa-jiwa dan pikiran yang disobjektif dan lemah akan kemerdekaannya sendiri.

Membentuk Militansi Anggota PMJ

Kembali, adanya diskursus (dapat berupa pendidikan formil ala PMJ) tentang teori prinsipil tentunya akan memberikan kesempatan ruang eksperimen terhadap subjek-subjeknya. Artinya, kembali pada berbagai sub-bab yang sudah kita bahas sebelumnya, metode, praktik kerja, mekanisme sacara taktis dan strategis akan terbentuk karena harus berpijak pada prinsip organisasi. Militansi anggota akan terbentuk jika kita memberikan ruang ekspresi terhadap lawan diskusi (baca: calon anggota PMJ) agar dapat memahami dan mencari sintesa mengenai pandangannya terhadap PMJ. Adanya praktik penggiringan opini dan memaksa lawan diskusi untuk mengerti apa yang kita maksud hanyalah memberikan doktrin-doktrin penilaian subjektif kita terhadap target penghimpunan calon anggota PMJ. Militansi anggota PMJ akan terwujud ketika subjek target penghimpunan telah mengerti dasar pijakan eksistensi PMJ; hingga akhirnya ia tahu bahwa bergabung dengan PMJ tidak hanya sekadar mengembalikan atmosfer metropolitarian di tanah rantauannya akan tetapi ia (bahkan kita semua) juga harus mengerti bahwa program

kerja PMJ yang terlibat atas situasi massa rakyat dan dengan kembali berpijak pada *bumi rantauan* adalah esensi utama dari alasan terbentuknya PMJ.

Walau pada sisi lain, kita juga akan menemukan situasi dimana beberapa saudara seperantauan kita yang sangat begitu mencintai PMJ (baca: militan) sekadar hanya untuk *nongkrong* atau mendapatkan akses informasi dan jaringan dari kakak rantaunya. Jika demikian, maka hal tersebut patutnya merupakan capaian yang cukup besar. Karena terang jelas, apa yang telah dilakukan oleh agen penghimpunan dan pengorganisiran telah memberikan ruang ekspresi primordial walau terlihat sebagai kebiasaan yang struktural. Celah tersebut-lah yang dapat digunakan untuk mengembangkan satu sama lain, menciptakan arena diskursus yang baik mengenai manifesto merantau; tidak hanya kuliah, akan tetapi belajar lebih dewasa! Tidak hanya sekadar belajar manajemen organisasi, terhimpun dan menghimpun mengajarkan dapat mengajarkan kita untuk *melotot* terhadap situasi dan arah kondisi yang jauh berbeda dengan kebiasaan kita sebelum merantau.

CULTUS PRIMORDIALIS

CULTUS PRIMORDIALIS

Indahnya keperantauan adalah ketika ekspresi habitus lama tidak hilang di tanah rantauan kita.

Kita akan membahas hal mengenai mahasiswa perantau yang begitu besar nilainya pada sub-bab ini; bagaimana kemudian alasan-alasan struktural PMJ yang kemudian dikultuskan menjadi bagian dari budaya tubuh PMJ tercipta. Akan tetapi, sebelum itu, tolong berikan saya kesempatan untuk menceritakan kisah menarik tentang kebimbangan dan kebingungan seorang mahasiswa perantau yang akhirnya dapat membuat dirinya menjadi agen militan di PMJ:

Kisah Kutukan Vijay

Konon terdapat sebuah kisah tentang seorang pemuda yang tampan, gagah, cerdas, dan berani – pemuda itu bernama Vijay. Vijay selalu mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, terlebih ia memiliki ketertarikan pada studi filsafat islam yang kental dengan ajaran filsafat timurnya; namun beliau tidak sama sekali bisa mencari

jawaban dari pertanyaan sederhana. Pada siang hari, Vijay menuju ke kampus dengan bekal cita-cita yang besar: menghancurkan kapitalisme dengan mewujudkan perdamaian sosialis dunia.

Ketika ia sedang menunggu dosen datang untuk mengajar kelasnya, Vijay berbincang dengan kawan satu kelas yang tepat duduk disamping kursinya; berbincang banyak hingga bertukar pengalaman dan latar belakang satu sama lain, hingga kawannya melontarkan pertanyaan: "Terus, kenapa side pilih kuliah di Lombok? Kan banyak kampus di Jawa tu", Vijay kebingungan dan tidak tahu harus menjawab apa. Ia begitu takut; pikirnya, jika ia tidak bisa menjawab pertanyaan se-krusial itu bagi para perantau Jabodetabek yang berkuliah di Pulau Lombok. Belum selesai Vijay berpikir untuk kemudian dijawab, kawannya kembali meninju Vijay dengan pertanyaan singkat: "Padahal kan kita yang dari Lombok, pengen sekali kuliah di Jawa. Kok side malah pilih kuliah disini?", lagi-lagi, belum Vijay mengelap keringat dinginnya, kawannya justru menggiring Vijay dengan jawaban subjektif: "Ooo mungkin side bosan ya sama hiruk pikuk di Jawa, kalo di Lombok kan santai. Sunyi, ndak macet, ndak bising."

Hingga Vijay beranjak kembali ke kontrakannya – pulang dengan langkah yang lesu karena bukan jawaban demikian yang ia ingin jawab. Ia merasa gagal menjadi mahasiswa perantau, karena jawaban dengan wacana "belajar bisa dimana saja" bukanlah jawaban yang konkret; hal tersebut hanyalah dapat berfungsi sebagai zirah seorang mahasiswa perantau agar tidak dilihat tidak bisa bersaing dengan teman-teman SMA-nya ketika kawan-kawan di wilayah asalnya cenderung saling bersaing mencari universitas di Pulau Jawa.

Tidak hanya Vijay yang menjadi korban, kawan-kawan seperantauannya-pun juga demikian. Sejak saat itu, pertanyaan tersebut telah dikultuskan sebagai pertanyaan sakral nan krusial bagi para perantau-perantau di PMJ. Hingga kini, pertanyaan demikian merupakan kutukan bagi tiap-tiap anggota PMJ yang baru memulai karir rantauannya.

Walau dongeng era *post-truth* yang memiliki bobot cerita yang anekdot ini merupakan salah satu manifesto terbentuknya Federasi Perantau Hitam, akan tetapi, hal ini juga merupakan bagian dari marjinalisasi perantau secara umum jika kita telaah melalui pendekatan

analisis wacana. Meskipun tidak semua anggota PMJ pernah mengalaminya, namun saya yakin paling tidak terdapat beberapa anggota PMJ mengalami hal yang pernah dialami oleh Vijay beserta kawan-kawannya (atau bahkan kawan-kawan perantau lain yang tidak terorganisir oleh PMJ secara formil). Cerita tersebut tidak sama sekali bermaksud untuk mendiskreditkan etnis lain; namun jika hal demikian menjadi kontradiksi bagi saudara/i pembaca sekalian, maka bersikap dewasalah! Bahkan para perantau juga mendapatkan bobot yang setimpal ketika wilayah asalnya dibandingkan dengan tanah rantauannya, secara abstrak, baik hal tersebut membuat beberapa mahasiswa perantau memang merasa sedikit bangga karena dipuja-puja – namun memiliki tanggungan beban moril; maupun mereka yang akhirnya merasa dikamarkan secara struktural hingga menciptakan kemungkinan masyarakat lokal tanah rantauan tidak melihat para perantau dari PMJ sebagai bagian dari mereka.

Tanamkan Identitas Simbolik!

Saya tegaskan kembali, bahwa PMJ merupakan organisasi egaliter! Tidak ada perdebatan selain itu, PMJ terbentuk secara apriori dan tidak memiliki nilai kompromis – PMJ pada tataran cita-citanya terbentuk karena manifestasi yang kuat, inisiatif kritis, dan nilai humanisme yang sudah terverifikasi manifestasinya (walau praktiknya kadang tidak demikian). Konsep egaliterian juga berpijak pada nilai-nilai yang tidak menunjukkan sistem hierarki baik dalam upaya

penghimpunan dan pengorganisiran maupun pelaksanaan operasional organisasi secara metodologis. Maka dari itu, PMJ sendiri memiliki kebudayaan yang mencerminkan bentuk-bentuk demikian. Akan tetapi, sebelum kita lebih jauh pada pembahasan sub-bab kali ini, bahkan masih banyak dari anggota maupun agen penghimpun PMJ yang masih memiliki kontradiksi mengenai persoalan struktural tersebut secara personal.

Kadangkala, narasi mengenai *Perantau PMJ* merupakan narasi yang membentuk kerangka dan visualisasi perantau yang terlihat berbeda; kebanyakan penilaiannya semata-mata sekadar karena pertimbangan *"Perantau yang berasal dari Kota ke Dearah"* atau yang paling menusuk adalah *"Perantau yang berasal dari Wilayah pusat segala sektor ekonomi-politik dan kebudayaan milik negara kemudian merantau ke wilayah yang bahkan sama sekali hampir tidak dipikirkan kondisi masyarakatnya" Ouch!*

Akan tetapi, dengan melepas kearogansian personal, hal tersebut dibutuhkan agar kemudian dapat menjadi simbol otentik organisasi; walau lagi-lagi harus tetap berpijak pada situasi dan kondisi berdasarkan era dan zamannya. Mengapa demikian? Hal ini pernah menjadi bahan penelitian Kelompok Studi Radmila pada agenda *Penelitian Tertutup Analisis Simbol dan Wacana Subjek Keperantauan*. Bahwa salah satu cara untuk membentuk militansi simbolik kepada anggota PMJ adalah dengan cara mempertahankan kebiasaan dan kebudayaan wilayah asalnya untuk kemudian dapat diterapkan pada atmosfer

dan wilayah tanah rantauannya. Pada hal tertentu mungkin kita akan seolah terlihat berbeda dan seakan tidak membaur dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat lokal tanah rantauan setempat; akan tetapi, tujuan dari upaya mempertahankan habitus wilayah asal kedalam wilayah tanah rantauan bagi mahasiswa perantau adalah untuk tetap dapat merasakan kehangatan wilayah asalnya.

Distorsi Sosio-Kultur

Mahasiswa perantau memungkinkan dirinya untuk dapat bertarung secara momentum terhadap habitus baru yang sebelumnya tidak pernah ia kenal; namun, ketika ia bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang yang sama ditengah atmosfer yang berbeda bagi kedua subjek terkait, masing-masing subjek dapat menciptakan kebahagiaan kolektif dengan cara bertukar cerita, pengalaman, pikiran, bahkan opini. Paling tidak kedua subjek dapat beristirahat sejenak dari derasnya distorsi sosio-kulturnya masing-masing – hingga bahkan mereka dapat bertukar pikiran mengenai *culture shock* yang mereka alami.

Culture shock atau distorsi sosio-kultur membenturkan banyak habitus lama dengan habitus baru kepada mahasiswa perantau; mulai dari nilai-nilai adat, norma-norma, habitus kultural, hingga sosio-politik yang tentunya tidak bisa digeneralisir dengan wilayah-wilayah yang memiliki implementasi primordial yang kuat. Misalnya seperti apa yang pernah Kawan Irma (Liga

Bekasi PMJ) alami, distorsi habitus yang ia alami cenderung berpatok pada norma dan nilai adat Pulau Lombok; dimana ia yang mungkin hanya sekadar cukup mengabari atau meminta izin orang tuanya mengenai ia yang akan pulang ke rumah larut malam jika sedang berpergian di wilayah asalnya, namun, Irma tentunya tidak diperbolehkan oleh Ibu Kosnya untuk pulang larut malam karena adanya ultimatum struktural mengenai *merariq dadakan* walau dengan izin sekalipun. Hal tersebut kemudian membuat Irma sedikit terkejut dengan norma yang mencerminkan patriarki-kultural di Pulau Lombok – atau biasa dengan sebutan narasi yang sedikit sopan: *"Masih kental adatnya"*.

Namun hal tersebut belumlah dapat dikategorikan sebagai bagian dari *culture shock*. *Culture shock* dapat didefinisikan sebagai gejolak yang membuat subjek terdistorsi dengan habitus baru, akan tetapi subjek yang mengalami *culture shock* tidak memiliki akses atau cara agar dapat menyesuaikan dirinya dengan atmosfer barunya, hingga membuat dirinya selalu menerapkan gaya hidup lama dan memungkinkan dirinya untuk seolah tidak mengenal dengan habitus barunya.

Karena pada akhirnya, berbicara mengenai distorsi sosio-kultur yang bahkan dapat memengaruhi kondisi mental personal memang tidak terlihat secara eksplisit, bahkan jika kita ingin berusaha sadar akan hal tersebut. Penilaian yang paling tidak bisa dilakukan adalah dengan cara mengulas kembali gejolak-gejolak *culture shock*, kita dapat memastikan dengan konkret ketika masa *culture*

shock personal telah usai – atau paling tidak melalui penilaian subjek lain yang pernah mengalami hal demikian terhadap diri personal.

Sintesa dari gejolaknya hanya sekadar terlihat seperti rindu akan kampung halaman, rindu dengan atmosfer wilayah asal, atau bahkan depresi karena tidak dapat bertahan secara mental personal ditengah atmosfer baru (hal ini biasanya dirasakan oleh mahasiswa perantau yang tidak memiliki banyak kawan/tidak berinisiatif membuka akses-akses sosial baru seperti teman baru dengan etnis aslinya di tanah rantauan).

Culture shock atau distorsi sosio-kultur ini yang kemudian menjadi antitesis terhadap eksistensi mahasiswa perantau. Ketika subjek sudah berhasil melewati masa-masa awal distorsi sosio-kulturnya, maka paling tidak subjek terkait sudah mengerti bagaimana menjadi lebih dewasa.

Biar Ga *"Culture Shock"* Ceunah

Kembali pada konteks awal pembahasan sub-bab kali ini; bahwasannya, untuk mereduksi gejolak distorsi sosio-kultur, mahasiswa perantau memerlukan langkah praktis untuk dapat tetap hangat dengan wilayah asli rantauannya ditengah atmosfer habitus barunya. Hal demikian dapat dimungkinkan dengan cara menghimpun dan mengorgansir subjek keperantauan terkhusus dalam tataran aras nama mahasiswa perantau agar dapat mempertahankan eksistensinya. Hal ini adalah langkah

paling mudah yang dapat kita lakukan semua, lagi-lagi saya tekankan, bahwa tidak ada wacana tentang menaikkan arogansi subjektif pada pembahasan sub-bab kali ini.

Menurut saya tidak ada masalahnya jika PMJ memiliki konsep struktural non-kelas dengan memanggil anggota perempuan PMJ dengan sebutan wilayah asalnya masing-masing seperti: *Mpok* = Jakarta; *Teteh* = Jawa bagian barat. Atau anggota laki-laki PMJ yang dipanggil demikian seperti: Bang = Jakarta; A'a = Jawa bagian barat.

Bahkan Angkatan Putih PMJ yang pernah menerapkan sistem upaya penciptaan komunitas egaliter dengan memasukkan teori feminisme yang dikelola oleh *Ibu Rantau* PMJ pada saat itu, Kawan Andini (Liga Jakarta PMJ). Konsolidasi perempuan dengan ketertarikan basis *julid* asal tidak menimbulkan pandangan subjekif menurut saya merupakan bagian dari pendekatan emosional kepada para anggota perempuan PMJ agar nantinya dapat berlaku sebagai agen politik PMJ.

Atau Agenda Curhat Ceria (CC) yang diperuntukkan bagi para anggota PMJ yang merasakan dirinya yang begitu problematik. Metodenya dengan cara yang diinginkan oleh si subjek problematik, misal: mabuk. *Hadeh… konyol*.

Intinya, ciptakan saja ekspresimu bahkan jika itu harus dikultuskan hingga diresmikan sebagai kebudayaan milik para mahasiswa perantau domisili Jabodetabek yang

berkuliah di Pulau Lombok. Pada akhirnya, hal yang seharusnya menjadi disiplin simbolik bagi para mahasiswa perantau adalah hanya *belajar yang bener* dan sekadar menghormati segala jenis dan bentuk sosio-kultur tanah rantauannya. Mempertahankan identitas? Menurut saya sama sekali tidak menjadi persoalan – asal tidak memicu geramnya etnis lain karena arogansi subjektif dari anggota PMJ yang cenderung oportunis. Konflik horizontal tidak pernah dibenarkan mengingat PMJ adalah komunitas paguyuban egaliter. *Emang lo mau perang etnis?!*
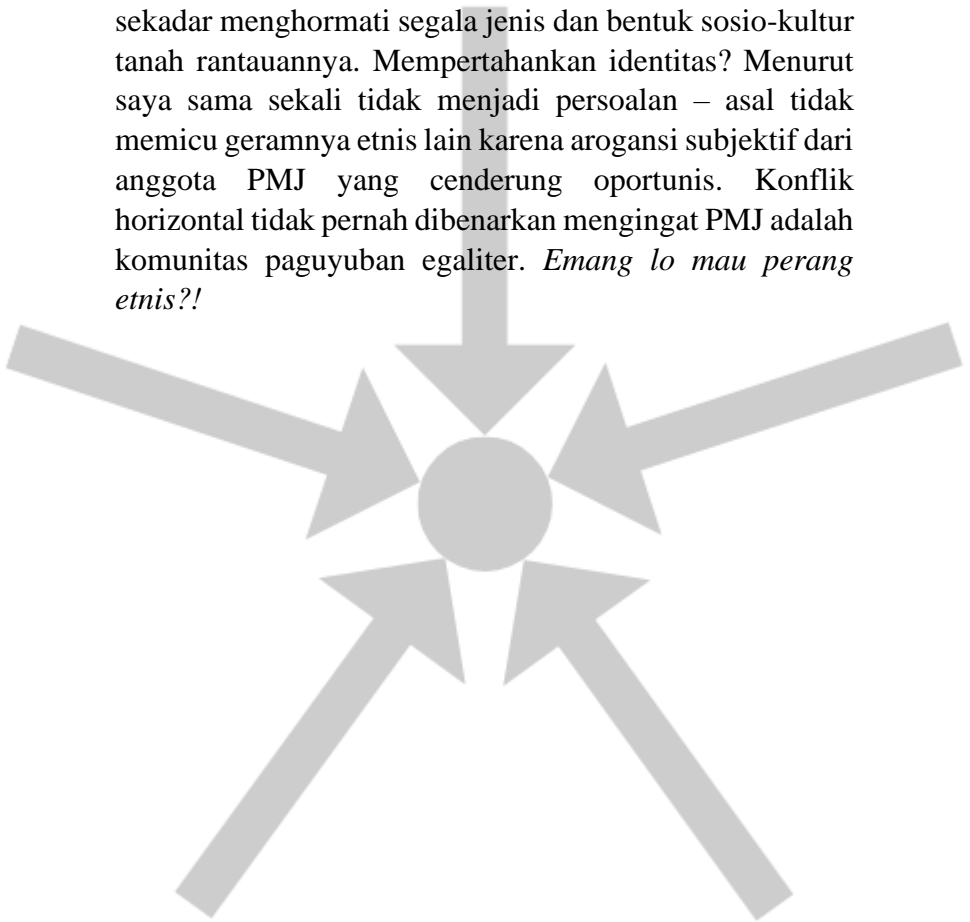
TABULASI BACOTAN

Kesimpulan.

Dewasa ini, kita sebagai mahasiswa perantau yang hidup di era *post-truth* kini telah terbiasa dengan banyaknya wacana mengenai lemahnya mental muda-mudi Indonesia yang terpapar dengan kultuasi *Gen-Z,* atau narasi *pemuda milenial*, atau apapun itu yang seakan terdengar harus mengerti apa yang dimaksud oleh para kaum antikritik yang menciptakan narasi demikian. Hingga pada akhirnya, istilah *culture shock* kemudian lahir untuk dapat membendung keresahan muda-mudi Indonesia yang seakan tidak memiliki solusi praktis karena begitu banyaknya metode yang ditawarkan oleh doktrin-doktrin ala pemikiran dan paradigma filsafat barat yang seakan terlihat agung. *Chuek!*

Sebagai mahasiswa perantau yang tidak terlepas dan terikat dengan dependensi situasi tanah rantauannya, hal yang dapat dilakukan adalah menghimpun dan mengorganisir mahasiswa perantau satu sama lain; hal tersebut kemudian dibutuhkan sebagai upaya untuk tetap menyatukan eksistensi status etnis yang memungkinkan terjadinya distorsi sosio-kultur. Artinya, cukup hanya sekadar langkah untuk paling tidak dapat memberikan momen "istirahat" bagi para mahasiswa perantau yang cenderung dan terkenal sangat problematik akan status emosional personalnya (lebih-lebih ketika mereka

dihadapkan dengan habitus barunya dengan tendensi habitus lamanya sebagai corong kebiasaan yang tidak disadari).

Untuk itu, memproyeksikan persatuan dengan sesama mahasiswa perantau merupakan langkah yang maju untuk menciptakan iklim kemajemukan didalam satu lingkaran yang solid. Akan tetapi, tidak semua cara dapat digunakan; artinya, harus ada proyeksi yang serius jika kita ingin memungkinkan pembentukan persatuan. Hanya dengan menghimpun sesama kemudian tidak memiliki langkah yang profesional, saya rasa hanya dapat menciptakan upaya penghimpunan dan pengorganisiran dalam hal skala tongkrongan – lebih-lebih hal tersebut hanya bersifat emosional dan memungkinkan tidak kontinunya upaya penghimpunan dan pengorganisiran. Tentunya kita tidak ingin memiliki praktik pekerjaan seperti paguyuban Jabodetabek yang lahir di Universitas Mataram pada kisaran tahun 2008, bukan?

Membentuk organisasi yang serius dengan tujuan mengorganisir sesama perantau pada penilaian kesamaan status etnis antar subjeknya dapat memungkinkan terbentuknya paguyuban – akan tetapi belum tentu hal tersebut mengamini gejolak komunitas yang maju. Ukuran majunya suatu oganisasi dapat dilihat dari terciptanya iklim demokrasi yang baik, hal ini dalam praksisnya dapat dilihat dari keterlibatan semua anggota dalam hal perwujudan demokrasi komunitas yang baik – bentuk konsensus atau keputusan yang ditetapkan secara bersama tanpa adanya tendensi kuasa subjektif antar

anggota dalam satu lingkaran komunitas, merupakan praksis dari perwujudan demokrasi total dalam organisasi.

Untuk itu, bentuk komunitas atau organisasi yang egaliter atau metode sistem kepemimpinan kolektif yang memiliki praktik kesetaraan dan keadilan total, lagi-lagi dapat mengamini iklim demokrasi yang total. Hingga pada akhirnya, dalam hal pelaksanaan perwujudan komunitas egaliter, implementasi mutual aid hingga pada tataran praktiknya didalam pelaksanaan operasional organisasi kemudian dapat mengamini egaliterian. Akan tetapi, ketika mutual aid hanya sekadar untuk membantu satu sama lain tanpa memungkinkan upaya untuk menciptakan agen penghimpunan dan pengorganisiran lain hanya akan membuat para agen sebelumnya merasa lelah dan seakan terlihat bekerja tanpa hasil. Syarat perwujudan mutual aid harus bersifat lebih dari hubungan mutualis antar anggota (meta-mutualis), membantu hak sesama mahasiswa perantau agar dapat dibentuk menjadi mahasiswa perantau yang lebih progresif. Hal ini yang kemudian menjanjikan adanya militansi anggota dan gerakan program yang berkelanjutan dalam skala komunitas paguyuban.

Upaya penghimpunan dan pengorganisiran akhirnya harus menjadi pekerjaan pokok bahkan jika hal demikian tidak termaktub dalam program momentum maupun program yang terencana. Untuk menciptakan pekerjaan yang profesional, maka para agen harus menciptakan prinsip pribadi yang lahir dari prinsip organisasi – jika hal tersebut menuai perdebatan, lantas

prinsip egaliter mana yang seakan memungkinkan implementasi dan praktik yang tidak baik?

Akan tetapi hal tersebut kemudian juga dapat menciptakan praktik yang keluar dari garis prinsip. Adanya penyakit organisasi seperti subjektfisme, sektarianisme, komandoisme, hingga buntutisme (*tailism*) merupakan kesalahan praktik yang kabur dari watak egaliterian. Hal ini kemudian dapat tercipta karena tidak adanya upaya penalaran berpikir dalam agenda yang serius terhadap upaya mempertahankan eksistensi komunitas paguyuban. Paradigma politik yang reaksioner, indisiplinasi anggota, hingga subjektifisme antar anggota dapat dimungkinkan timbul karena tidak terbiasanya dan tidak siapnya subjek terkait (baca: agen penghimpunan dan pengorganisiran) terhadap benturan situasi lapangan dengan misi penghimpunan dan pengorganisiran. Tidak terbiasanya me-*refresh* dan melakukan asessment pada akhirnya hanya menciptakan upaya dan misi yang hanya bersandar pada *personal mood*, tidak melalui profesionalitas pekerjaan.

Jika saya sempat menyinggung bahwa metode penghimpunan dan pengorganisiran harus menyesuaikan era dan zamannya yang bersifat dialektis, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan malpraktik pengorganisiran, lagi-lagi karena praktik pengorganisiran juga harus berpijak pada prinsip-prinsip egaliterian yang tidak menolak perkembangan dialektika gejolak.

Untuk itu, alat pemaksa yang dilahirkan dari suprastruktur organisasi yang egaliter memiliki peranan penting untuk menciptakan para agen-agen yang profesional. Langkah voluntarisme milik para agen profesional dengan tujuan untuk menyesuaikan situasinya dengan situasi massa (massa yang cenderung memiliki basis pemikiran moralis) dapat menjadi metode yang bercorak politis secara implisit atau tidak terlihat sekalipun.

Akan tetapi, pada akhirnya, yang paling sederhana adalah bagaimana kemudian para mahasiswa perantau dapat menghormati segala macam bentuk ritus, kultus, habitus, kebiasaan, dan kebudayaan tanah rantauannya walau berbagai macamkemungkinan gejolak baik dari luar maupun dalam diri dapat memengaruhi pola serta sikap hidupnya.

Akhir kata, saya beserta kolektif Kelompok Studi Radmila, mengucapkan terimakasih yang biasa-biasa saja karena niatan saudara/i pembaca sekalian yang membaca manual book ini hingga selesai. Kosturad akan selalu mendukung gerakan egaliter yang lahir dari gejolak politik yang menyebabkan kemandirian masyarakat egaliter hingga dapat independen dari segala pengaruh politik reaksioner. Maka dari itu, PMJ yang lahir dari disrupsi pendidikan dan kebudayaan yang dilahirkan dari situasi ekonomi-politik hingga memaksa manusia untuk merantau, merupakan bagian dari kami. Bagian dari manusia yang hilang dan mencoba untuk “tetap bertahan.”
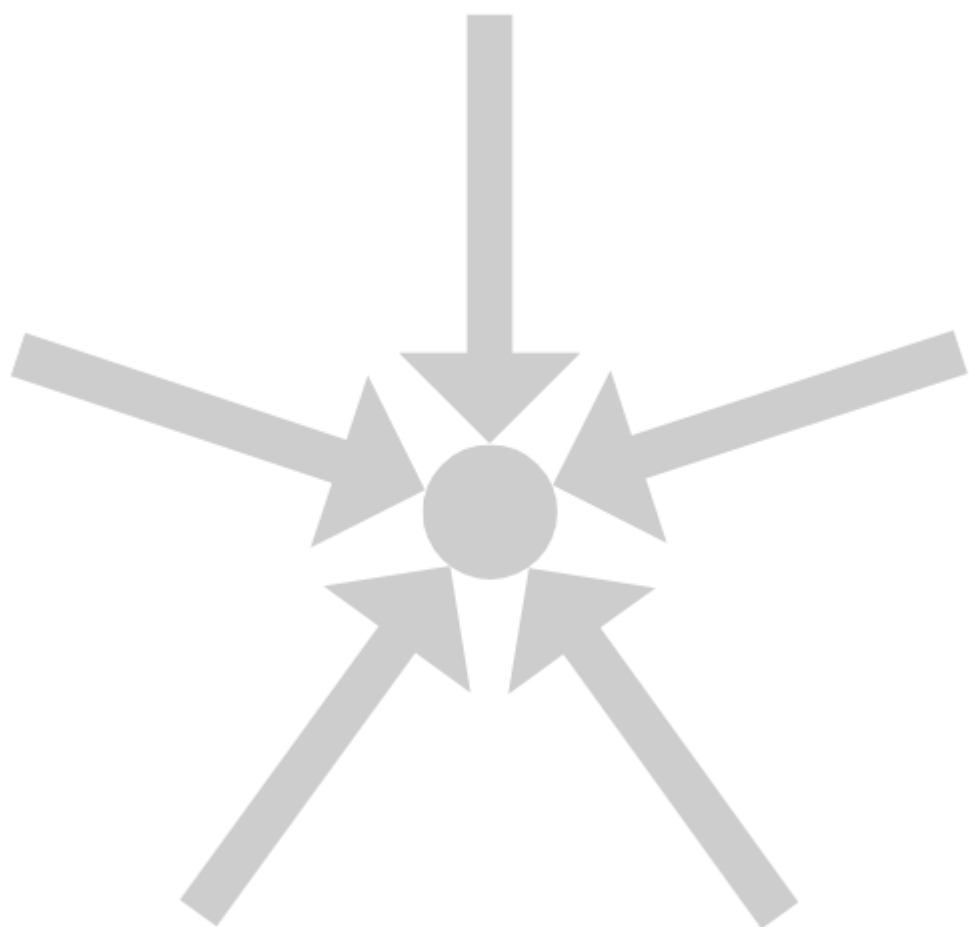
DAFTAR PUSTAKA

1. For a recent analysis see Crowder, George, "*Classical Anarchism: The Political Thought of Godwin, Proudhon, Bakunin and Kropotkin*" (Oxford, 1991) Google Scholar.

2. Todes, Daniel P., *"Darwin's Malthusian Metaphor and Russian Evolutionary Thought, 1859–1917",* Isis, 78 (1987), hal. 537–551 CrossRef Google Scholar PubMed.

3. Mondolfo, Rudolfo, "Kropotkin, Prince Petr Alexeyevich", in Seligman, E.R.A. (ed.), Encyclopedia of the Social Sciences, VII (London, 1930), hal. 602–603 Google Scholar.

4. Jurnal Freedom, 146 (March–April 1900), 173 (January 1903), and 195 (January 1905).

5. Kropotkin to Alfred Marsh, 3 September 1904, 20 June 1905, International Institute for Social History [hereafter IISH], Marsh collection.

6. Bakunin, Michael, Statism and Anarchy, ed. Shatz, Marshall (Cambridge, 1990), hal. 141 *CrossRef Google Scholar.*

7. Jurnal Justice, *"Kropotkin as Mock Bourgeois Radical"* (March 1904).

8. Kropotkin, *“Mutual Aid: A Factor of Evolution”* (Boston, n.d.), hal. 72–75 and appendix VI.

9. Kropotkin, , *“Caesariam”.* Freedom, 139 (06 1899) *Google Scholar.*

10. Kropotkin, *“Anarchist Morality”* (London, n.d.), hal. 8.

11. Alexander Supartono, *“Lekra vs Manikebu” (*Jakarta, 2000), hal. 141 – 150.

12. Federasi Mahasiswa Libertarian Salatiga, *“Mengorganisir Mahasiswa Anarkis*” (Salatiga, 2017), hal. 1 – 19.

13. Bad Moon, *“Metropolis Dengan Perintah Asing: Sebuah Manifesto Dekonstruksi”* (Yogyakarta, 2021), hal. 16 – 43.

14. Dokumen Investigasi No. III – Kelompok Studi Radmila, “*Penelitian Tertutup: Analisis Simbol dan Wacana Subjek Keperantauan*”.

15. Dokumen Investigasi No. VI – Kelompok Studi Radmila, *“Penelitian Tertutup: Manifesto Objektif Ibadah Bulan Ramadan”*.

16. Dokumen Investigasi No. XI – Kelompok Studi Radmila, *“Penelitian Tertutup: Tatanan Simbolik dan Internalisasi Hasrat Subjek Keperantauan”*.

17. Dokumen Investigasi No. XIV – Kelompok Studi Radmila, *"Penelitian Tertutup: Pembuktian Sintesa Redefinisi Subjek Keperantauan"*.

SELAMAT MERANTAU!